



**PENGEJAWANTAHAN NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN
ETIKA POLITIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI
GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Oleh

Mohamad Satriyo Utomo, S.H.

Marsekal Pertama TNI

KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Etika Politik Dan Penguatan Sistem Demokrasi Guna Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Penentuan judul Taskap ini didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI beserta seluruh civitas Lemhannas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024.

Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Tutor Taskap dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini hingga selesai sebagaimana ketentuan Lemhannas RI. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI dan Pemerintah pada umumnya, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkan terkait **“Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Etika Politik Dan Penguatan Sistem Demokrasi Guna Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,



Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
Nomor Peserta 060



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
Pangkat : Marsma TNI
Jabatan : Staf Khusus Kasau
Instansi : TNI AU
Alamat : JL. Mandala Blok G NO. 18 Kompleks Dwikora
Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.


Jakarta, 15 Agustus 2024
Penulis,

(Materai Rp.10.000)



Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
Nomor Peserta 060

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI.
Judul Taskap : PENGEJAWANTAHAN NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN ETIKA POLITIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2024, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, 15 Agustus 2024
Tutor Taskap,


Prof. Dr. Drs. Khasan Effendy, M.Pd.
Tajar Bidang Sismennas

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Maksud dan Tujuan	10
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	10
5. Metode dan Pendekatan	12
6. Pengertian	12
BAB II	LANDASAN PEMIKIRAN
7. Umum	16
8. Peraturan Perundang-undangan	18
9. Data dan Fakta	21
10. Kerangka Teoretis	25
11. Lingkungan Strategis	28
BAB III	PEMBAHASAN
12. Umum	35
13. Pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik saat ini	38
14. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan sistem	

demokrasi pada tata Kelola pemerintahan saat ini 48

15. Strategi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur 61

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan 77

17. Rekomendasi 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

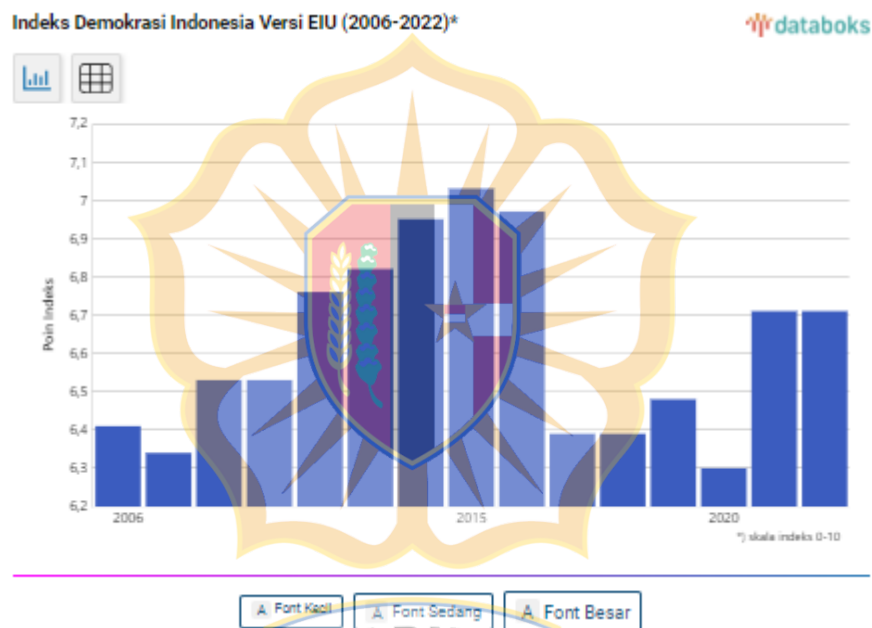
Indonesia merupakan negara berdaulat yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Sistem pemerintahan Demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga masyarakat dapat secara bebas menggambarkan, mengartikulasikan dan mengungkapkan gagasannya untuk berkontribusi dalam setiap kebijakan pemerintah. Masyarakat dalam sistem Demokrasi dapat melakukan segala aktivitas dan fungsinya guna memberikan andil pemikiran terhadap seluruh keputusan politik pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan dan dikendalikan dengan baik oleh warga negara serta tepat sasaran.

Demokrasi Pancasila yang menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam sistem ketatanegaraan telah diputuskan secara mufakat oleh para pendiri bangsa, dengan kesepakatan bersama, merupakan ideologi yang rasional dan berwawasan jauh ke depan. *The Founding Father* dan para pemimpin bangsa pada masa itu menyadari bahwa Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya, sehingga Demokrasi Pancasila menjadi pilihan terbaik yang harus dijunjung tinggi. Penerapan sistem Demokrasi di Indonesia menurut indeks Demokrasi tahun 2022 versi *The Economist*, menempatkan Indonesia berada di posisi ke 54 di antara 167 negara.²

¹ Cora Elly Noviati (2013) Demokrasi dan Sistem Pemerintahan
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106> Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.15 WIB

² Kompas.com (2023) https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/19/101215765/posisi-indonesia-pada-indeks-demokrasi#google_vignette. Diakses pada 19 Maret 2024 pukul 19.15 WIB

Economist Intelligence Unit (EIU) pun mencatat bahwa skor Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari tahun 2022 dimana kala itu Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 6,71 dan menempati posisi 56 dari 167 negara.³ Implikasi dari skor dan peringkat tersebut, EIU mengelompokkan Indonesia sebagai negara sebagai *Flawed Democracy* atau Demokrasi Cacat. Aspek penilaian lain yang dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 ini adalah Indikator proses pemilu dan pluralisme Indonesia menunjukkan skor tertinggi sebesar 7,92. Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38).



Gambar 1. Data Indeks Demokrasi Indonesia
(sumber databoks tahun 2023)

Demokrasi Pancasila merupakan konsep Demokrasi yang berakar pada pandangan hidup atau filosofi bangsa Indonesia dimana mengedepankan budaya karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila dengan nilai-nilainya yang luhur secara idiil disepakati sebagai Dasar Negara di Indonesia, namun secara

³ Media Indonesia (2024) Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia masih Cacat
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat> Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 20.10 WIB

faktual masih ditemui adanya tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut yaitu :

- a. Maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, politisi dan anggota masyarakat lainnya yang merugikan kepentingan umum (Selama tahun 2023, terdapat 161 kasus tindak pidana korupsi).
- b. Terjadi tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik dalam konteks agama, suku, atau orientasi politik (politik identitas).
- c. Terdapat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebanyak 155 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan (intimidasi, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan).
- d. Terjadi penerapan dan penegakkan hukum yang jauh dari azas keadilan (hukum yang tajam kebawah dan tumpul ke atas).
- e. Terdapat ketimpangan ekonomi dan konflik sosial yang signifikan serta kebijakan pemerintah yang tidak selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat secara merata (harga komoditi dan bahan pangan meningkat, lapangan pekerjaan minim, perselisihan di segala lapisan masyarakat cenderung meningkat).
- f. Adanya individu/kelompok yang seringkali mengganggu dan mengacaukan stabilitas nasional serta kerusuhan horisontal/vertikal (polarisasi, fanatisme parpol yang berlebihan, penyimpangan etika dan kebijakan demokrasi).

Maraknya penyimpangan dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia saat ini, merupakan peringatan tanda bahaya dan trigger perlunya memperjuangkan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang luhur dalam rangka membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila meliputi nilai Dasar, nilai Instrumental dan nilai Praksis memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan kebijakan negara Indonesia. Nilai Dasar Pancasila merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam lima sila Pancasila

yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara dan memuat cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar dalam setiap sila-nya. Nilai Instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang lebih spesifik dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila dimana mencakup ketentuan konstitusional mulai dari UUD 1945 sampai peraturan daerah dan bersifat lebih khusus dibandingkan nilai dasar serta berfungsi sebagai alat untuk menjabarkan dan menerapkan nilai-nilai dasar dalam praktiknya. Adapun nilai praksis Pancasila dijelaskan sebagai realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari yang terus berkembang atau berubah seiring perkembangan zaman, dimana Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang terbuka. Nilai praksis ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk karakter serta etika politik bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menjadi pilar dalam pembentukan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan.⁴ Memudarnya nilai-nilai Pancasila mulai dapat dirasakan dalam setiap sendi kehidupan dan penghidupan aspek Asta Gatra di Indonesia, hal ini menggambarkan kondisi yang secara factual dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan serta menerapkan prinsip-prinsip dasar negara, dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dengan luas wilayah lebih dari 1,9 juta kilometer persegi dan lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 kelompok etnis, serta letak yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Keunikan geografis ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah memudarnya nilai-nilai Pancasila, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, keterbatasan

⁴ Dwi Yanto (2017) Etika Politik Pancasila <https://core.ac.uk/download/pdf/327228215.pdf>
Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 09.29 WIB

aksesibilitas, perbedaan budaya lokal, perkembangan teknologi, serta ketimpangan pembangunan dan disparitas ekonomi antarwilayah⁵.

- b. Kondisi Demografi di Indonesia, dimana derasnya arus urbanisasi dan globalisasi, telah membawa perubahan dalam gaya hidup, persepsi, dan nilai-nilai masyarakat. Kita dapat melihat dan merasakan bahwa identitas adat budaya ketimuran yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia di mata dunia sudah mulai memudar⁶.
- c. Sumber Kekayaan Alam Indonesia sering dieksploitasi secara tidak berkelanjutan, baik oleh perusahaan maupun individu, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila atau pelestarian lingkungan hidup yang dipegang teguh oleh Pancasila.
- d. Polarisasi ideologi di mana terdapat perbedaan pendapat tentang interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila sehingga terdapat kelompok-kelompok yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai arti dan urgensi dari Pancasila.
- e. Polarisasi politik seringkali mengaburkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Persaingan politik yang keras dan kurangnya etika politik bisa mengakibatkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip lima sila dalam Pancasila.
- f. Dalam aspek ekonomi, ketidaksetaraan pembangunan ekonomi dan praktik korupsi dapat menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kesenjangan ekonomi antar wilayah juga bisa menjadi penghalang bagi pemerataan manfaat pembangunan yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesejahteraan Pancasila.
- g. Terjadinya diskriminasi terhadap minoritas, intoleransi, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan dan konflik sosial di

⁵ LR Aulia, DA Dewi, YF Furnamasari (2021) Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, Jurnal Pendidikan Tambusai <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2355> Diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 20.25 WIB

⁶ AZ Abdul Aziz, MR Mohammad Rana (2020) Pudarnya Nilai-nilai Pancasila <http://repository.syekhnrjati.ac.id/4162/> Diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 20.25 WIB

beberapa bagian Indonesia menandakan adanya kemerosotan dalam pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam Pancasila.

- h. Dalam hal perubahan budaya dan gaya hidup, terutama yang dipengaruhi oleh arus globalisasi secara masif, menyebabkan masyarakat mengabaikan nilai-nilai tradisional dan nasional, termasuk nilai-nilai luhur Pancasila. Pengaruh budaya populer dari luar negeri bisa menggeser fokus dan identitas kebangsaan.
- i. Faktor Hankam dengan adanya gerakan radikalisme, terorisme dan ekstremisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dapat mengancam keutuhan Pancasila sebagai ideologi negara yang menganut nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan persatuan.

Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Saat ini dapat dirasakan bahwa etika politik di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, titik kulminasinya dapat dilihat dari perhelatan Pemilu 2024, dimana secara kasat mata dapat dirasakan tingkat kompleksitas dan dinamisnya membangun Demokrasi Pancasila yang demokratis. Realitas yang tidak terbantahkan dapat kita lihat dalam kontestasi pemilihan Presiden/Wapres, dimana masing-masing kubu paslon menunjukkan adanya upaya-upaya pembenturan dan penggiringan antar capres/cawapres melalui berita hoax dan fitnah. Beberapa pelanggaran etika yang sangat besar dalam praktik politik di lapangan, khususnya pada masa pemilu Presiden/Wapres, terjadi fenomena dan upaya mengalihkan topik kontroversi pemilu presiden/wapres diluar substantifnya, seperti menyerang secara pribadi dan negatif kinerja seorang calon presiden dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Mekanisme proses debat Capres dan Cawapres seyogyanya dipenuhi dengan persaingan gagasan, program, visi, dan tanggung jawab, dengan tetap menjaga kesantunan, saling menghormati dan beretika. Dampaknya tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh media cetak Kompas pada tanggal 29 Januari hingga 2 Februari 2024, dimana penilaian publik terhadap Presiden tercermin dari sikap Presiden yang terlihat lebih condong ke arah

mendukung secara politis, baik terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik tertentu, dinilai sebagai perilaku yang melanggar prinsip etika politik dan demokrasi di Indonesia.⁷

Disamping masalah Pemilu, beberapa contoh pelanggaran etika politik yang merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila terjadi ketika banyak pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi, intervensi pengadilan dan penegakkan hukum yang tajam kebawah namun tumpul ke atas dan pejabat/elit politik yang tersangkut perkara baik pidana maupun perdata serta melanggar nilai moralitas. Contoh pelanggaran etika politik yang seringkali dilakukan oleh para pejabat yang juga merupakan elit politik adalah melakukan kampanye terselubung. Salah satu Menteri pembantu Presiden dipandang melanggar etika politik ketika melakukan kampanye terselubung untuk mendorong dinastinya yang dikemas dalam kegiatan bantuan sosial saat membagikan minyak goreng gratis di Telukbetung, Lampung.⁸ Diabaikannya etika politik dan lemahnya sistem Demokrasi juga terasa manakala para pejabat negara tidak memiliki sikap seperti layaknya seorang negarawan, tidak diposisikannya kekuasaan dan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem Demokrasi Indonesia dalam implementasi sendi kehidupan penghidupan aspek Astra Gatra, undang-undang yang pro kepada komunitas tertentu dan tidak adanya keadilan sosial.

Idealnya dalam membangun sistem Demokrasi dilakukan dengan meningkatkan masyarakat untuk sadar politik, menerapkan nilai-nilai yang mengandung keadilan, kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, kekuasaan politik dapat menerapkan proses Demokrasi yang lekat dengan terciptanya keselarasan, karena tujuan negara haruslah sesuai dengan Pancasila dan kebijakan etika politik yang dikembangkan oleh elit politik untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana mengatasi permasalahan bangsa saat ini.

⁷ Litbang Kompas (2024) Urgensi Menjaga Etika Politik dan Demokrasi di Pemilu 2024 <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/05/urgensi-menjaga-etika-politik-dan-demokrasi-di-pemilu-2024> Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 09.30 WIB

⁸ Szalma Fatimarahma (2022) "Pengamat: Kampanye Minyak Goreng Zulkifli Hasan Langgar Etika Politik", <https://kabar24.bisnis.com/read/20220712/15/1554229/pengamat-kampanye-minyak-goreng-zulkifli-hasan-langgar-etika-politik> Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 21.35 WIB

Etika politik dan sistem demokrasi memiliki dampak positif pada tata kelola pemerintahan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, namun mirisnya saat ini justru muncul kondisi-kondisi negatif yang terlihat pada tata kelola pemerintahan yang disebabkan karena maraknya dinasti politik. Dampak negatif pada tata kelola pemerintahan terutama dapat dilihat melalui fenomena dinasti politik, diantaranya :

- a. Fenomena dinasti politik terhadap kekuasaan politik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya menghasilkan kekuasaan yang *self-perpetuating*. Hal ini dapat menggerus regenerasi kepemimpinan politik dan memengaruhi prinsip-prinsip Demokrasi seperti kesetaraan dan keadilan.⁹
- b. Keterlibatan anggota keluarga dalam dinasti politik meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena mereka cenderung menganggap kekuasaan sebagai hak milik pribadi atau kelompok tertentu. Dampak dari situasi ini, sumber daya negara dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat umum.
- c. Praktik dinasti politik dapat membatasi ruang partisipasi masyarakat umum dalam proses Demokratis, menciptakan disparitas dan membatasi partisipasi masyarakat yang sebenarnya harus menjadi elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰
- d. Dinasti politik dapat memicu ketergantungan terhadap kekuasaan keluarga tertentu, menggeser fokus dari layanan publik ke kepentingan kelompok tertentu.

⁹ The conversation.com (2024) 3 dampak negatif ketika pemerintahan dikuasai dinasti politik <https://theconversation.com/demokrasi-di-rezim-prabowo-gibran-3-dampak-negatif-ketika-pemerintahan-dikuasai-dinasti-politik-222626> Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 20.11 WIB

¹⁰ Azisrezarr (2023) "Politik Dinasti di Indonesia: Antara Tradisi, Etika, dan Dampak Negatifnya terhadap Demokrasi" <https://medium.com/@azisrahadian/politik-dinasti-di-indonesia-antara-tradisi-etika-dan-dampak-negatifnya-terhadap-demokrasi-3f146fbb1052> Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 20.21 WIB

Dalam mengatasi dampak negatif ini, diperlukan strategi untuk mempertahankan integritas Demokrasi. Partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, pelaksanaan pemilu yang transparan, dan reformasi kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip Demokrasi tentunya dapat membangun fondasi politik yang kokoh, mengurangi dampak buruk dari dinasti politik, dan menuju sistem Demokrasi yang lebih berkelanjutan serta inklusif. Menyadari fenomena ini, perlu adanya pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, sehingga pilar demokratis akan selalu terjaga dan politik berada pada batasan-batasan etika dan aturan yang berlaku.

2. Rumusan Masalah.

Indonesia adalah negara kepulauan, dengan posisi silang berada diantara dua Benua dan dua Samudera memiliki nilai geografis yang sangat strategis. Kondisi ini menempatkan Indonesia menjadi negara yang penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Pada kenyataannya kita melihat hingga saat ini, tata Kelola pemerintahan belum juga mampu mewujudkan cita-cita nasional yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara belum sepenuhnya menjadi tuan rumah di rumah sendiri, kehidupan Masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur masih menjadi sebuah harapan dan cita-cita. Selain itu, Pancasila telah lama menjadi dasar ideologi negara Indonesia, implementasinya dalam kehidupan politik dan sistem demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Seharusnya, nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan etika politik yang tinggi dan memperkuat sistem demokrasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat berbagai masalah seperti korupsi, praktik politik yang tidak etis, lemahnya partisipasi masyarakat, serta ketidakstabilan politik yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam Taskap ini adalah “bagaimana mengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik?”. Selanjutnya agar analisa dan pembahasan yang akan dilakukan lebih mudah dan terarah maka pertanyaan kajian dalam penulisan taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik saat ini?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan sistem demokrasi pada tata Kelola pemerintahan saat ini?
- c. Bagaimana strategi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini bermaksud menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang ideal.
- b. **Tujuan.** Taskap ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran kepada para pemangku kepentingan untuk dapat menentukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang ideal.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan naskah ini dibatasi pada bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aspek etika politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Fokus utama adalah pada implementasi nilai-nilai tersebut dalam pengambilan keputusan politik, perilaku politisi, dan struktur tata kelola pemerintahan.
- b. **Sistematika.** Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka sistematika penyusunan Taskap ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan. Bab I memuat tentang latar belakang yang berisikan fakta-fakta dan data yang berkaitan dengan kondisi politik dan demokrasi Indonesia dalam tata kelola pemerintahan saat ini, maksud dan tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Taskap ini serta beberapa pengertian untuk memperjelas istilah yang dianggap penting dalam tulisan.
- 2) Bab II Landasan Pemikiran. Bab II mengurai tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional, serta beberapa kerangka teoretis dan tinjauan pustaka yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan terkait pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, kemudian terdapat analisis berbagai pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang bersifat global, regional dan nasional yang didalamnya terdapat berbagai peluang dan kendala yang dihadapkan pada kondisi nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi, sehingga berdampak pada meningkatnya tata kelola pemerintahan.
- 3) Bab III Pembahasan. Bab III berisi gambaran umum mengenai kondisi dan pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian yang dianalisa menggunakan analisis ASOCA dengan menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif, menggunakan kerangka kerja teoritis tertentu berdasarkan data/fakta serta landasan teori sampai ditemukannya faktor penyebab masalah dan solusi yang bisa ditemukan.
- 4) Bab IV Penutup. Sebagai bagian akhir dari penyusunan Taskap, Bab IV berisikan tentang simpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan analisa serta beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, TNI dan Lemhannas RI serta instansi

terkait agar pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan studi literatur berupa pengumpulan data dan informasi dari teks tertulis (studi kepustakaan dari data sekunder maupun data primer) yang selanjutnya dianalisa menggunakan analisis ASOCA, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dalam memecahkan permasalahan.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional yang berlandaskan Empat Konsensus Bangsa, dengan analisa multi disiplin ilmu sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

6. **Pengertian.** Penjelasan beberapa pengertian sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan Taskap ini.

a. **Pengejawantahan.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengejawantahan memiliki beberapa arti, disamping sebagai perwujudan, pelestarian, manifestasi, juga sebagai proses, cara, atau perbuatan yang mengejawantahkan suatu posisi, kondisi, sikap, pendirian, dan lainnya. Ini merupakan manifestasi atau perwujudan dari suatu kondisi atau sikap tersebut.¹¹ Menurut John Dewey (1859-1952), seorang ahli pendidikan dan filosof Amerika, pengejawantahan adalah bagian dari proses belajar yang penting dimana individu mengubah konsep atau gagasan menjadi tindakan konkret melalui pengalaman langsung. Pendapat ini mencerminkan pendekatan Dewey terhadap

¹¹ Kbbi.lektur.id "5 Arti Kata Pengejawantahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://kbbi.lektur.id/pengejawantahan> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 09.00 WIB

pendidikan dan belajar sebagai proses yang berpusat pada pengalaman dan interaksi aktif dengan lingkungan.¹²

- b. Pengejawantahan nilai Pancasila.** Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, pengejawantahan nilai Pancasila adalah realisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan konkret yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa. Pengejawantahan nilai Pancasila sebagai realisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan konkret yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persatuan, dan kesatuan bangsa. Menurutnya, pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan seperti polarisasi masyarakat berdasarkan primordialisme dan radikalisme. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kunci untuk menjaga persatuan negara dan bukan bersifat fanatisme/*chauvinisme* yang merugikan negara lain demi kepentingan bangsa sendiri.¹³
- c. Etika politik.** Menurut Eko Handoyo dalam bukunya "*Etika Politik*" Edisi Kedua tahun 2016, mengatakan bahwa etika politik adalah disiplin yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengarahkan tindakan politik, baik di tingkat individu maupun lembaga politik. Etika politik mencakup pertimbangan moral dalam pembuatan keputusan politik dan bagaimana tindakan politik tersebut mempengaruhi keadilan sosial. Etika politik terdapat tiga tujuan, sebagai berikut :
- 1) Etika politik bertujuan untuk mengatur kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 - 2) Etika politik diharapkan dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas.

¹² Hasbullah (2020) Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/3770> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 09.21 WIB

¹³ Jimly Asshiddiqie (2020) "Pancasila Adalah Identitas Konstitusional Bangsa Indonesia" <https://www.mpr.go.id/berita/Jimly-Asshiddiqie:-Pancasila-Adalah-Identitas-Konstitusional-Bangsa-Indonesia> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 09.50 WIB

- 3) Etika politik menjadi sebuah tolok ukur kepribadian seorang politisi, mulai dari sifat hingga bagaimana kinerjanya.

Prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi standar dalam menjalankan kehidupan berpolitik. Etika politik menekankan pentingnya moralitas, keadilan, kebenaran, dan kepentingan umum dalam tindakan politik untuk menciptakan tatanan politik yang adil dan bersih.¹⁴

- d. **Demokrasi.** Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat atau wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui proses Demokratis, dengan penekanan pada kepentingan umum, partisipasi publik, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dan akuntabilitas pemerintah terhadap kehendak mayoritas.¹⁵ Menurut Abraham Lincoln (1809-1865) dalam bukunya "*Demokrasi*", demokrasi adalah "pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka. Demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik, menciptakan perubahan, dan meningkatkan kondisi politik dan sosial secara lebih baik.^{16 17}
- e. **Tata Kelola Pemerintahan.** Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2009) mengartikan tata kelola pemerintahan sebagai penggunaan kekuasaan politik untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial negara, termasuk upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan

¹⁴ Handoyo, Eko (2020) Etika Politik Edisi Kedua <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/41840> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 10.00 WIB

¹⁵ Anugrah dwi (2023) "Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya" <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 10.15 WIB

¹⁶ kumparan.com (2023) "Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln dan Beberapa Ahli Lainnya" <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln-dan-beberapa-ahli-lainnya-20YtDqdEXgs> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 10.45 WIB

¹⁷ Daewoong (2024) Demokrasi menurut abraham lincoln <https://daewoong.co.id/demokrasi-menurut-abraham-lincoln> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.00 WIB

akuntabilitas.¹⁸ Tata kelola pemerintahan merupakan suatu sistem aturan, lembaga, dan praktik yang mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.¹⁹ Tata kelola pemerintahan (*Good governance*) yang baik mengacu pada pengelolaan sumber daya dan masalah publik secara efektif dan efisien, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, aturan hukum yang adil, transparansi, responsif, konsensus orientasi, efektivitas dan efisiensi, desentralisasi, penciptaan pasar yang kompetitif, akuntabilitas, dan visi strategis.²⁰



¹⁸ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/19809/19406> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.23 WIB

¹⁹ Wartiningsih (2021) Apakah Tata Kelola Pemerintahan Dan Struktur Politik Mampu Menekan Kecenderungan Terjadinya Korupsi Di Indonesia? https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/38397/20350 Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.43 WIB

²⁰ Yusriadi (2023) Buku "Reformasi Birokrasi dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia" <https://repository.ar-raniry.ac.id/28256/1/Buku-Implementasi-Tata-Kelola-Pemerintahan.pdf> Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.55 WIB

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum.

Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi diharapkan menjadi manifestasi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup nilai-nilai yang mendasari etika politik dan demokrasi, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi krusial dalam mewujudkan etika politik yang sehat serta penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan nilai yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala penjabaran norma hukum, norma moral dan norma kenegaraan. Norma kenegaraan tersebut salah satunya adalah etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu.²¹ Pancasila juga menekankan pentingnya persatuan dan kerakyatan, yang menuntut pemerintah untuk mengedepankan kerangka kerja yang menghormati dan menghargai keberagaman suku, budaya, agama, ras dan etnis di Indonesia. Secara substansial, Pancasila menjadi fondasi filosofis atau pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, mengimplikasikan bahwa nilai-nilai yang merangkungnya memperkuat perannya sebagai landasan untuk semua aspek kehidupan dan penghidupan, baik dalam ranah hukum, moral, maupun kenegaraan. Dalam konteks kenegaraan, etika politik menjadi salah satu norma yang essensi.

²¹ Kesbangpol (2022) Pancasila Dalam Etika Politik
<https://kesbangpol.sbbkab.go.id/read/45/Pancasila-dalam-etika-politik> Diakses pada `4 Agustus 2024 pukul 20.55 WIB

Etika politik menuntut bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti Asas legalitas yang menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang berlaku, disahkan secara demokratis, serta prinsip moralitas yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Keniscayaan sebagai sumber etika politik, Pancasila mengandung makna bahwa segala aspek yang terkait dengan penggunaan kekuasaan, pembuatan kebijakan publik, dan alokasi kewenangan haruslah diberkahi dengan legitimasi moral, hukum, dan demokratis yang melekat. Pemahaman ini mencerminkan kondisi bahwa betapa pentingnya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan religius, hukum, serta demokrasi dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.²²

Standar perilaku yang dianggap ideal dalam praktik etika politik negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, harus menjadi acuan utama dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini disebabkan karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang penting dalam membentuk etika politik dan penguatan sistem demokrasi. Pancasila sebagai landasan ideologi negara di Indonesia, mewakili nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang harus diwujudkan melalui perundang-undangan, peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai sumber etika politik yang menekankan pentingnya pelaksanaan kekuasaan negara sesuai dengan norma-norma tertentu yang artinya dalam menjalankan dan mengatur negara, semua aspek yang terkait dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan pembagian kewenangan harus mengedepankan legitimasi moral religius. Ini tercermin dalam makna sila-sila Pancasila, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD 1945 merupakan perundang-undangan dasar negara di Indonesia dalam menjamin kehidupan yang demokratis dan peradaban bangsa yang bermanfaat untuk

²² Monica Ayu Caesar Isabela (2022) "Pancasila sebagai Sumber Etika Politik"
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/04000051/Pancasila-sebagai-sumber-etika-politik>
diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 09.00 wib

mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 berisi tentang hukum dan kewajiban warga negara, yang dapat digunakan sebagai acuan utama dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi. TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa bertujuan sebagai panduan untuk membentuk karakter individu yang memegang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, menjaga kesehatan, memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan mandiri. TAP MPR tersebut bertujuan agar warga negara menjadi individu yang demokratis dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi landasan utama dalam mewujudkan etika politik dan memperkuat sistem demokrasi. Hal ini dilakukan dengan mendorong perilaku yang mencerminkan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keberagaman, dan keadilan sosial.²³

8. Peraturan Perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan yang berada ditangannya dan dilakukan menurut UU. Prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) ini kemudian diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, kepala daerah dan turunan dari kegiatan tersebut yang terwujud dalam pengambilan keputusan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memainkan peran kunci dalam mengukuhkan etika politik, memperkuat sistem demokrasi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan menegaskan prinsip negara hukum sebagai landasan yang mendasari semua aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia.²⁴

²³ An'imah Maulida Ahadyah, Malinda Riska Aprilia, Shofi Aulia (2023) "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Dalam Membentuk Akhlak yang Baik" <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file--resource-Fcontent-F1--Pancasila-Sebagai-Ideologi-Bangsa.pdf&forcedownload=1> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 09.45 wib

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 09.55 wib

- b. Undang-undang No 10 tahun 2016 pasal 187 A s/d D tentang perubahan kedua terhadap UU No 1 tahun 2015 yang membahas Pilkada. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku *money politics*, baik yang memberi maupun penerima uang akan dikenakan sanksi hukuman penjara dan denda yang setimpal karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Perubahan kedua terhadap UU No 1 tahun 2015 yang membahas tentang Pilkada, diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 pasal 187 A s/d D, mencakup beberapa penyesuaian penting yang bertujuan untuk mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan sebagai peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Undang-undang ini mencakup peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, termasuk pelaporan kampanye dan penggunaan dana untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan adil dan bersih, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penguatan partisipasi warga diharapkan mendorong keikutsertaan warga yang lebih aktif dalam proses pemilihan, penegakan hukum dan pengawasan demi memastikan bahwa semua aspek proses berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi serta peningkatan kualitas kandidat, sehingga dapat dipastikan bahwa pemimpin yang dipilih oleh masyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya.²⁵
- c. Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur organisasi, tugas, dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam konteks mengaktualisasikan etika politik, memperkuat sistem demokrasi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, Undang-Undang ini memiliki beberapa aspek yang relevan seperti pencegahan praktik politik uang, penegakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20160408-095326-3107.pdf> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00 wib

pemilihan umum, perlindungan hak pilih dan partisipasi masyarakat termasuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak pilih. Penegakan Etika Politik dan Tata Kelola Pemerintahan mencakup pembentukan lembaga pengawas pemilihan, penegakan hukum terhadap pelanggaran etika politik, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pemilihan.²⁶

- d. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Nasional. Etika kehidupan berbangsa berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan nasional dan ajaran agama, terutama ajaran kemanusiaan yang universal. Pancasila berfungsi sebagai acuan dasar untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks mengaktualisasikan etika politik, memperkuat sistem demokrasi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, Ketetapan MPR memiliki prinsip-prinsip yang relevan, antara lain: Kesadaran akan norma-norma moral dalam setiap aspek kehidupan nasional, termasuk dalam praktek politik seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang harus menjadi landasan dalam perilaku politik. Penguatan etika politik dalam praktik demokrasi termasuk penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, partisipasi aktif dalam proses politik, serta penegakan aturan dan nilai-nilai demokratis dalam setiap tahapan pemilihan umum. Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan mencakup hak warga negara untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi mencakup prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.²⁷

²⁶ Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<https://peraturan.go.id/uu-no-7-tahun-2017> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.15 wib

²⁷ Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Nasional
https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/070422_2017-Jurnal-Majelis-Edisi-Penegasan-Materi-

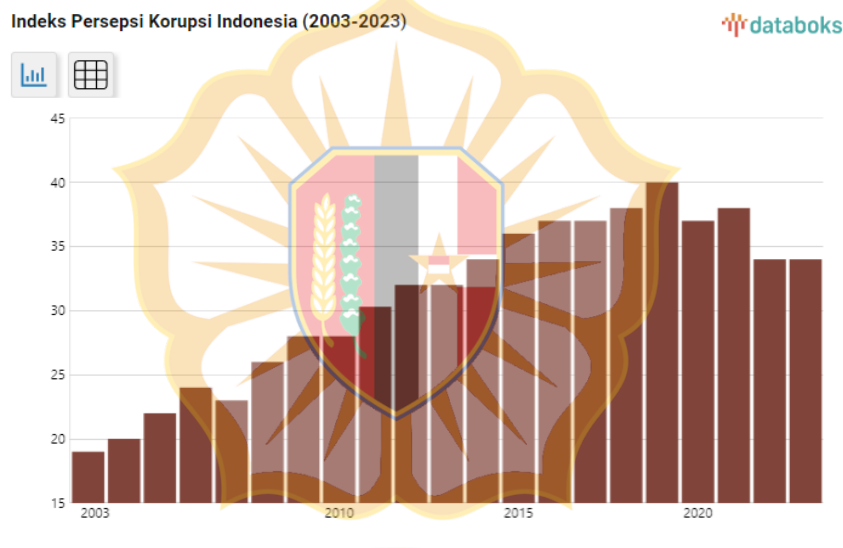
9. Data dan Fakta.

- a. Dalam Seminar “Indonesia *Outlook Post 2024*” oleh FISIP UI yang berlangsung tanggal 21 s.d 22 Februari 2024 di Auditorium Juwono Soedarsono, FISIP UI, Depok. Pemilihan Umum tahun 2024 dianggap penting karena pemerintahan baru yang akan terpilih bertanggung jawab merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2025-2045. Pentahapan awal pemilihan yang berjalan, masyarakat mulai merasa curiga bahwa proses pemilu tersebut akan diwarnai oleh tindakan curang dan manipulatif. Masyarakat meragukan netralitas, independensi, dan kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Prof. Valina Singka (Guru Besar Ilmu Politik dari FISIP UI) menyatakan bahwa berbagai tindakan tidak etis dari kalangan elit politik sebelum pemilu, seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, Keputusan MK mengenai syarat usia Capres/Cawapres, dan isu pelaksanaan pilpres dalam satu putaran, semakin memperkuat pandangan publik bahwa pemilu tidak akan dilaksanakan secara jujur dan adil. Bawaslu menerima data mengenai pelanggaran sebanyak 962 laporan dan 465 temuan. Hasilnya, terdapat 408 kasus pelanggaran, 278 kasus bukan pelanggaran, dan 100 kasus masih dalam proses penanganan. Jenis pelanggaran meliputi 26 kasus pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.²⁸
- b. Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menurut Indeks *Corruption Perceptions Index* (CPI) untuk tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-6 di antara negara-negara ASEAN. Meskipun skor CPI Indonesia tetap tidak berubah di angka 34, namun peringkat global negara ini mengalami penurunan lima posisi menjadi peringkat

Status-Hukum-MPRS-MPR-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.45 wib

²⁸ Seminar Kebijakan FISIP UI (2024) “Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca 2024” <https://fisip.ui.ac.id/masa-depan-demokrasi-indonesia-pasca-2024-seminar-kebijakan-fisip-ui/> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.15 wib

115 pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Skor Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43), Vietnam (41), dan Thailand (35). Selain itu, data Transparency International juga menunjukkan adanya tren penurunan CPI Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, CPI Indonesia mencapai angka 40, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 34 pada tahun 2022, dan tetap stabil pada tahun 2023. CPI diukur pada skala 0 hingga 100, dimana skor 0 menunjukkan tingkat korupsi tertinggi, dan 100 menunjukkan keadaan paling bersih.²⁹



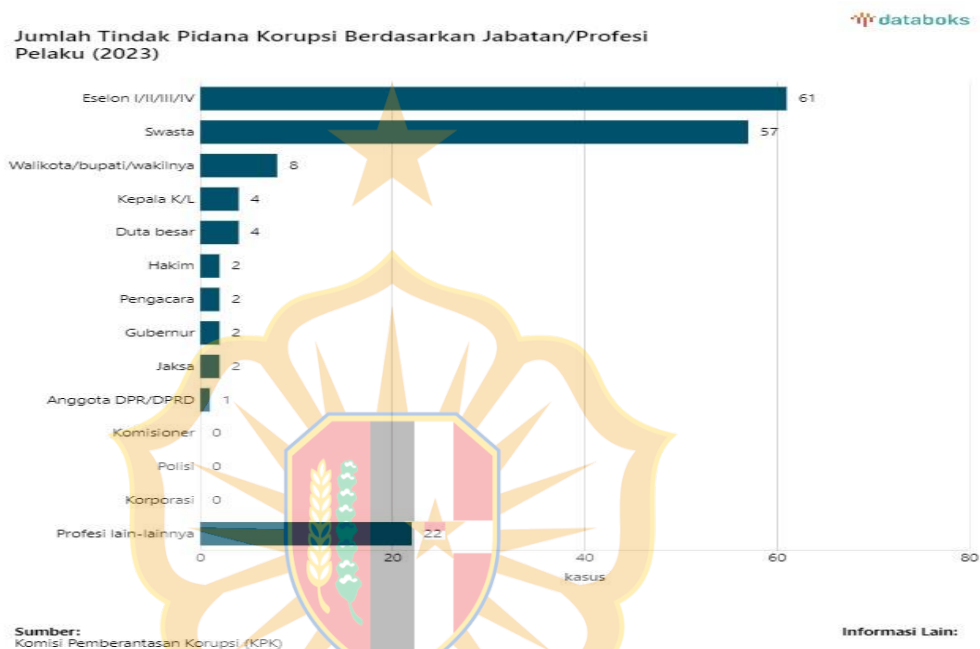
Sumber Databoks skor indeks persepsi korupsi indonesia 2023³⁰

- c. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik masih terjadi secara rutin di Indonesia, mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan penggunaan dana pemerintah untuk keperluan pribadi atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan tugas pejabat (Praktek Korupsi). Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat mengakibatkan kerugian

²⁹ Transparansi Internasional (2024) "Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023" <https://www.transparency.org/en/press/2023-corruption-perceptions-index-reveals-urgent-need-for-tangible-change-in-asia-pacific> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.23 wib

³⁰ DataboSkor Indeks (2024) "Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.25 wib

bagi pemerintah dan masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.³¹ Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus).³²



Sumber Databoks pelaku korupsi di Indonesia pada 2023 berasal dari jajaran pejabat eselon³³

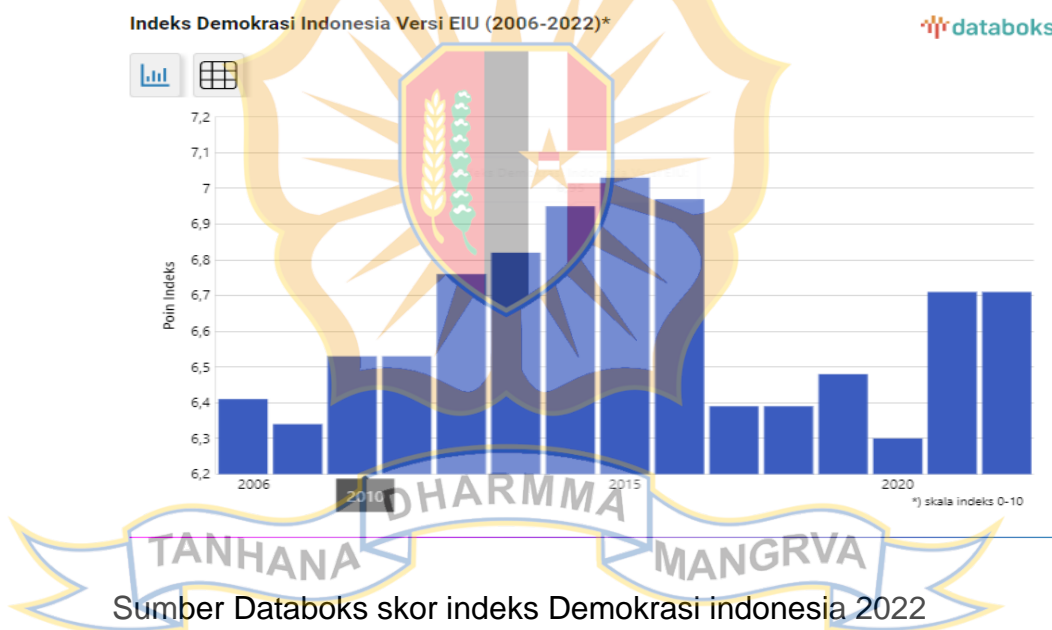
- d. Sistem demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan berbagai aspek kualitas demokrasi dan pemerintahan, seperti: Dinasti politik dan penyalahgunaan kekuasaan; Konflik kepentingan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden, menunjukkan adanya pertentangan kepentingan di dalam

³¹ Khairunas (2015) Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.15 wib

³² Aksi informasi (2023) Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.45 wib

³³ Data Boks (2024) Profesi Pelaku Korupsi 2023, Mayoritas Pejabat Eselon <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/07/profesi-pelaku-korupsi-2023-mayoritas-pejabat-eselon> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.45 wib

lembaga peradilan dan mengabaikan kaderisasi tanpa proses kaderisasi partai terlebih dahulu. Menurut Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan penurunan pada tahun 2023, yang tercermin dari penurunan skor kinerja demokrasi negara tersebut selama tahun tersebut. Berdasarkan data *Economist Intelligence Unit* (EIU), terjadi penurunan skor Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 6,53 poin pada tahun 2023, mengalami penurunan setidaknya dalam dua tahun terakhir. Penurunan ini menyebabkan peringkat Indonesia turun dua poin dibandingkan dengan tahun 2022, dengan penurunan total skor sebesar 6,71 poin menjadi 6,53 poin. Akibatnya, peringkat Indonesia dalam indeks tersebut turun menjadi posisi 56. Dengan skor 6,53 poin, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara demokrasi cacat menurut Economist Intelligence Unit (EIU).³⁴



- e. Pada peringatan 25 tahun Reformasi, mahasiswa dan aktivis menyatakan bahwa pelaksanaan Agenda Reformasi dianggap gagal. Penyebab kegagalan ini disebabkan oleh fakta bahwa aktor politik atau elit politik secara menyeluruh mengabaikan agenda reformasi dan lebih memprioritaskan kepentingan oligarki. Berbagai kegiatan seperti forum diskusi dan seminar diadakan oleh pelaku sejarah 1998 dan juga

³⁴ Databoks (2023) Cek Data: Anies Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, Benarkah? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/12/cek-data-anies-sebut-indeks-demokrasi-indonesia-menurun-benarkah> diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.33 wib

mahasiswa generasi Z. Mereka menyatakan bahwa saat ini penegakan hukum telah terkompromi, konstitusi sering diabaikan, dan sulit menemukan penegak hukum yang benar-benar melayani kepentingan rakyat. Selain itu, kegagalan dalam mewujudkan reformasi juga disebabkan oleh perilaku elit politik yang dengan sengaja mengabaikan agenda reformasi.³⁵

10. Kerangka Teoretis.

Dalam rangka memperjelas pembahasan terkait pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan maka digunakan beberapa teori yang mendukung proses pembahasan tersebut sehingga ditemukan kesamaan antara pokok persoalan dengan teori yang digunakan.

- a. **Teori Etika Deontologi.** Immanuel Kant mengatakan bahwa Etika deontologis merupakan suatu teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu perbuatan dinyatakan benar bila sesuai dengan prinsip tugas yang bersangkutan, atau suatu perbuatan dikatakan benar bila didasari oleh niat baik. Dalam pandangan Kant, moralitas didasarkan pada prinsip kategoris imperatif, yang menyatakan bahwa tindakan harus dilakukan berdasarkan prinsip yang bisa dijadikan hukum universal, dan individu harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sekadar sebagai sarana. Teori Etika Deontologi Kant dapat digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi dalam Pancasila, dengan menekankan kewajiban moral, imperatif kategoris, penggunaan akal budi, dan kemanusiaan.³⁶
- b. **Teori Demokrasi.** Sebagaimana menurut H. Harris Soche yang ditulis di Yogyakarta oleh Hanindita pada tahun 1985. Menurut H. Harris Soche,

³⁵ Irfan Murpratomo (2023) Kegagalan Reformasi Era Jokowi, Peretasan Medsos dan Pengintaian Rumah Oposisi <https://www.kedaipena.com/kegagalan-reformasi-era-jokowi-peretasan-medsos-dan-pengintaian-rumah-oposisi/> diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.44 wib

³⁶ Mohammad Maiwan (2018) "Memahami Teori-Teori Etika Menurut Immanuel Kant" <https://repository.radenfatah.ac.id/pdf> Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.40 WIB

demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, dimana kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Teori demokrasi menurut H. Harris Soche berfokus pada pengembangan sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengaturan pemerintahan, sehingga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab Terhadap pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi, teori demokrasi H. Harris Soche dapat digunakan dalam menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung nilai-nilai dasar, termasuk nilai instrumental, membantu memfasilitasi partisipasi rakyat dalam progres dan kondisi daerah dan negara.³⁷

- c. **Teori Pilihan Rasional.** Menurut James Coleman dalam teori ini, orang bertindak berdasarkan pilihan rasional mereka untuk mencapai hasil dan tujuan yang mereka inginkan. Tujuan dapat dicapai dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan memaksimalkan penggunaannya. Menurut Coleman, rasionalitas sendiri dipengaruhi oleh cara yang berbeda untuk menangani masalah. Salah satu pihak berpikir secara rasional dan yang lainnya berpikir secara irrasional. Teori Pilihan Rasional, keterkaitannya dengan pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut: **Pertama.** Coleman memandang individu sebagai aktor yang memiliki tujuan dan nilai-nilai dasar yang mempengaruhi pilihan mereka. Dalam konteks Pancasila, aktor-aktor politik dan masyarakat diharapkan memiliki tujuan yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kebenaran, dan kebersamaan; **Kedua,** Teori Pilihan Rasional

³⁷ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-demokrasi/> Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.55 WIB

menekankan bahwa tindakan individu diarahkan oleh pertimbangan rasional. Dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi, individu harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Hal ini berarti bahwa pilihan-pilihan politik harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan sehat, sesuai dengan nalar manusia; **Ketiga**, Coleman menekankan pentingnya interaksi dan organisasi sosial dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial. Dalam konteks Pancasila, interaksi antar individu dan kelompok harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta sistem demokrasi yang kuat dan etika politik yang jelas; **Keempat**, Teori Pilihan Rasional menekankan pentingnya pengendalian sumber daya dalam mencapai tujuan. Dalam konteks Pancasila, pengendalian sumber daya harus dilakukan dengan cara yang etis dan demokratis, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dipenuhi secara adil.³⁸

- d. **Teori Nilai.** Menurut Notonegoro teori nilai dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, kebutuhan fisik, kesehatan, dan kebutuhan rohani, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku dan identitas individu dalam masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yaitu nilai Dasar, Instrumental dan Praksis serta nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan kebijakan negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kebijakan dan kebijakan negara. Menurut Prof. Notonegoro, Pancasila memiliki peran krusial dalam etika politik dan demokrasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pancasila sebagai sistem nilai fundamental mencakup nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terbagi dalam kategori nilai material, vital, dan kerohanian. Pancasila berfungsi sebagai

³⁸ Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2009, Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir, Yogyakarta: Kreasi Wacana. Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 20.15 WIB

pedoman moral dalam politik dan pemerintahan, namun menghadapi tantangan seperti korupsi, fanatisme, dan penyebaran hoaks. Peluangnya termasuk membangun politik yang berkeadilan dan meningkatkan kualitas demokrasi.³⁹

11. Lingkungan Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional dan nasional memiliki irisan dan keterkaitan yang erat. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menjaga kepentingan nasional, ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai potensi ancaman. Analisis strategis untuk merumuskan ancaman dilakukan secara kontinu terhadap data, fakta, dan tren situasi baik di skala global, regional, maupun nasional.

a. Perkembangan Lingkungan Global

Dalam masyarakat internasional, isu-isu global seperti penguatan nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan tetap menjadi fokus utama. Penanganan isu-isu global ini sering menjadi indikator dalam menilai hubungan antar negara, baik dalam skala bilateral maupun multilateral. Disamping hal tersebut diatas, perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Globalisasi telah memudahkan batas-batas antar negara, memperluas pertukaran informasi secara global dan massive, namun juga menimbulkan tantangan seperti meningkatnya individualisme, kosmopolitanisme, dan radikalisme. Semua ini dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kebersamaan dan solidaritas. Selain itu, fenomena fundamentalisme pasar, dominasi sistem hukum modern, maraknya radikalisme dan ekstremisme, serta intoleransi dan konflik sosial juga menjadi tantangan serius bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam

³⁹ Kumparan (2023) Definisi dan Macam-Macam Nilai Menurut Notonegoro
<https://kumparan.com/berita-terkini/definisi-dan-macam-macam-nilai-menurut-notonegoro-1zyjSuJyFFW> Diakses pada 19 Maret 2024 pukul 19.55 WIB

masyarakat. Menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya pengejawantahan Nilai-nilai Pancasila dalam rangka memperkuat pemahaman dan implementasi ajaran luhur Pancasila agar tetap relevan dan menjadi *Centre Of Gravity* bangsa Indonesia di tengah dinamika globalisasi yang terus berkembang.

b. Perkembangan Lingkungan Regional

Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional juga memiliki pengaruh yang kuat baik positif maupun negatif. Isu-isu utama dalam keamanan kawasan meliputi terorisme, ancaman lintas negara, konflik komunal, dan klaim teritorial yang belum terselesaikan. Konflik antar negara terkait klaim wilayah, seperti di Kashmir antara India dan Pakistan serta di Laut Cina Selatan antara Cina dan negara-negara di Asia Tenggara, tetap menjadi perhatian. Di samping itu, konflik internal di beberapa negara di kawasan, termasuk ancaman separatisme dan konflik komunal, juga berpotensi mengancam keamanan regional. Konflik di suatu negara memiliki dampak yang dapat menyebar ke negara lain, melalui penyelundupan senjata dan bahan peledak. Wilayah Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat sibuk, hal ini menarik perhatian dunia Internasional dan mendorong negara-negara besar untuk terlibat dalam upaya keamanan di wilayah tersebut. Fenomena berdampak bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan, ambisi negara-negara besar ini menjadi sebuah tantangan bagi kebijakan pertahanan di masa depan. Perkembangan strategis yang dinamis mempengaruhi tata kelola pertahanan negara, terkait kekuatan militer dan kompleksitas ancaman. Konflik di beberapa kawasan Asia Pasifik, berpotensi memunculkan tantangan bagi Indonesia dalam menangani konflik dan tercapainya perdamaian. Perubahan pola konflik bersenjata memengaruhi dinamika konflik kontemporer, sementara perkembangan geopolitik dan geostrategi menimbulkan tantangan kompleks bagi pertahanan negara. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk mempertahankan etika

politik dan penguatan demokrasi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila secara idealistis, dalam menghadapi tantangan-tantangan regional tersebut.

c. **Perkembangan Lingkungan Nasional**

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran nasional dapat mempengaruhi etika politik dan penguatan sistem demokrasi melalui berbagai aspek seperti geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, pertahanan dan keamanan.

1) Geografi.

Geografi Indonesia yang strategis, mencakup wilayah daratan, lautan, dirgantara dan kepulauan. Saat ini penyebaran penduduk di Indonesia belum merata, dimana 62% penduduknya Sebagian besar tinggal di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Konsentrasi penduduk di wilayah tertentu menyebabkan urbanisasi yang lebih besar, perkembangan industri, dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah pinggiran, termasuk Pulau-Pulau Terluar, mengalami kepadatan penduduk yang lebih rendah dan pembangunan yang lebih lambat. Kesenjangan ini secara historis merupakan salah satu faktor sentralisasi kekuasaan dan pengaruh, dimana wilayah barat dan tengah Indonesia yang lebih maju memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap wilayah timur Indonesia yang kurang berkembang. Geografis ini mempengaruhi akses terhadap sumber kekayaan alam dan pasar, serta kemudahan dalam terjalinnya kemitraan dan perdamaian. Geografi juga mempengaruhi distribusi dan kepadatan penduduk, yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan pusat dan pembangunan daerah.⁴⁰

⁴⁰ Chris Drake (2019) Dimensi Geografis Semakin Pentingnya Indonesia di Dunia
<https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/geographic-dimensions-of-indonesias-increasing-importance-in-the-world/> diakses pada tanggal 3 April 2024 pukul 10.15 wib

2) Demografi.

Kondisi demografi Indonesia, termasuk keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, menuntut praktik politik yang beretika dan inklusif. Praktik demokrasi yang ideal di Indonesia harus mengedepankan etika luhur yang konsisten baik dalam ucapan dan perbuatan, serta menghormati keberagaman suku dan agama. Tampilan politik yang bermuka ganda atau tak beretika dapat menjadi contoh buruk bagi generasi selanjutnya, mengingat pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam etika politik. Kondisi demografi Indonesia, termasuk populasi, usia, dan distribusi, mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan sosial, serta kemampuan negara tersebut untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Demografi yang beragam juga menuntut pembangunan yang inklusif dan adil untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara.⁴¹

3) Sumber Kekayaan Alam.

Pengelolaan sumber kekayaan alam di Indonesia juga mempengaruhi etika politik dan kekuatan demokrasi melalui kaca mata transparansi dan akuntabilitas. Upaya pemerintah untuk meliberalisasi pengelolaan sumber kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi strategis menyiratkan perlunya transparansi yang lebih besar dalam alokasi dan penggunaan sumber daya alam. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara masyarakat dan memastikan bahwa tindakan pemerintah adalah yang terbaik bagi kepentingan bangsa. Sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara mempengaruhi kemampuan negara tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Pengelolaan sumber kekayaan alam yang berkelanjutan dan adil

⁴¹ Asep Saepudin Jahar (2023) Etika Politik Berdemokrasi <https://www.uinjkt.ac.id/id/etika-politik-berdemokrasi> diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 10.25 wib

juga menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.⁴²

4) Ideologi.

Pancasila berperan sebagai dasar negara dan ideologi yang fundamental. Pancasila tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan tujuan luhur bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menguatkan kesatuan dan kebersamaan serta mencegah aktivitas kelompok radikal. Ideologi yang berlapis, termasuk Pancasila dan UUD 1945, menjadi dasar etika politik dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Ideologi ini menuntut kepentingan nasional di atas kepentingan partai atau golongan, serta memelihara stabilitas politik yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.⁴³

5) Politik.

Kondisi politik nasional sedang mengalami restrukturisasi yang signifikan dalam infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Pembangunan komunikasi politik yang demokratis di semua tingkatan diharapkan akan memperbaiki sistem politik nasional yang demokratis. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti sistem pemilihan umum, komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, dan konflik potensial terkait pemekaran wilayah dan sengketa perbatasan. Konflik di wilayah Papua menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Pengelolaan pemerintahan negara, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di

⁴² Nyein Nyein Thant Aung (2023) Indonesia Sebagai Kekuatan Tengah: Mengarungi Pangung Regional-stage <https://thesecuritydistillery.org/all-articles/indonesia-as-a-middle-power-navigating-the-regional-stage> diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 20.25 wib

⁴³ Asnul (2021) Mencermati Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Di Era Digital <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13951/Mencermati-Tantangan-Pancasila-Sebagai-Ideologi-Negara-Di-Era-Digital.html> diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 20.25 wib

Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan paradigma nasional, seperti konsep wawasan nusantara, yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional.⁴⁴

6) Ekonomi.

Ketidakpastian dalam ekonomi global menuntut respon cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi peluang dan tantangan. Penting untuk mempersiapkan diri menghadapi arus bebas barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan investasi dengan cermat. Pemerintah juga telah menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kinerja perekonomian, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi perekonomian Indonesia, termasuk tingkat pertumbuhan, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, mempengaruhi stabilitas politik dan kemampuan negara tersebut untuk mewujudkan kemitraan dan mengatasi konflik. Perekonomian yang stabil dan inklusif menuntut kebijakan yang adil dan merata untuk semua warga negara.⁴⁵

7) Sosial Budaya.

Globalisasi mengakibatkan transformasi nilai-nilai yang mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku generasi penerus suatu bangsa serta memunculkan beragam masalah kebangsaan yang berdampak pada keragaman budaya bangsa. Pengaruh nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan identitas bangsa Indonesia dapat mengikis pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat menurunkan sikap nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.

⁴⁴ Deksino, George Royke (2018) Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia <http://repository.uki.ac.id/852/1/George.pdf> diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 21.25 wib

⁴⁵ Mila Mumpuni(2023) Buku "Kepemimpinan Asli Indonesia" https://www.google.co.id/books/edition/Kepemimpinan_Aslu_Indonesia/K07UEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 22.25 wib

Kondisi sosial dan budaya di Indonesia, termasuk nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dirasakan belum sangat matang, mempengaruhi etika politik dan memperkuat sistem demokrasi. Sosial budaya yang beragam dan inklusif menuntut pembangunan yang adil dan merata, serta memperkuat persatuan dan persatuan bangsa.⁴⁶

8) Pertahanan dan Keamanan.

Masih ada ancaman separatisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Separatisme dilakukan melalui gerakan politik dan pemanfaatan senjata yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Konflik horizontal yang dipicu oleh keragaman budaya, suku, agama, etnis, dan kondisi sosial juga masih menjadi tantangan dalam menjaga keamanan dalam negeri. Disamping itu konflik ini sering kali melibatkan kelompok-kelompok etnis dan agama yang berbeda, memicu konflik dan ketidakstabilan yang berdampak pada goyahnya Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pertahanan dan keamanan nasional Indonesia yang kuat menjadi penting dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan menjamin stabilitas politik nasional. Pertahanan yang inklusif dan adil mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, partai ataupun golongan, serta memperkuat ketahanan nasional.⁴⁷

⁴⁶ Perdagangan Senjata Di Tanah Papua <https://repository.uir.ac.id/22387/1/document-1.pdf> diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 22.45 wib

⁴⁷ Syahrul Akmal Latif, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy (2023) Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua <https://repository.uir.ac.id/22387/1/document-1.pdf> diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 22.45 wib

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, tidak hanya diposisikan sebagai slogan belaka, tetapi merupakan pandangan hidup yang menjadi fondasi utama bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukanlah sekedar konsep-konsep hampa tanpa makna, melainkan prinsip-prinsip kongkrit yang menjadi sendi dasar bagi semua aspek kehidupan penghidupan bangsa dan negara. Salah satu aspek yang sangat berkaitan dan memiliki relevansi terhadap nilai Pancasila adalah dalam bidang politik dan tata kelola pemerintahan. Kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan filosofis yang kuat bagi penyelenggaraan negara yang demokratis dan praktik pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan semangat para pendiri bangsa Indonesia yang bercita-cita membangun negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana kesejahteraan seluruh rakyat dijamin. Fakta yang terjadi seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan muncul dan menguji keluhuran penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik dan tata kelola pemerintahan. Keadaan ini terhubung dengan masalah-masalah yang timbul dalam dinamika politik dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), politik identitas, politik dinasti, sistem berdemokrasi dan berbagai bentuk pelanggaran etika politik lainnya.

Etika politik yang berasaskan Pancasila adalah prinsip berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang menyiratkan bahwa dalam penyelenggaraan negara, segala aspek yang terkait dengan kekuasaan, kebijaksanaan yang bersentuhan dengan publik dan alokasi kewenangan harus diberikan legitimasi secara moral-religius. Etika politik mewajibkan agar nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan sebagai refleksi landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dijabarkan dalam karakter insan-insan manusianya, berbentuk peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahannya.

Seyogyanya semua regulasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh melanggar esensi dan semangat Pancasila. Etika politik memberikan standar untuk menilai tindakan politik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara serta untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik. Etika politik yang terhubung dengan institusi-institusi seperti negara, pemerintahan dan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif bersifat sangat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor nonjuridis, sosial-psikologis dan sosial-politis.⁴⁸ Penyelenggaraan negara di semua aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijaksanaan, bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan pembagian wewenang harus didasarkan pada legitimasi moral, agama, legalitas dan prinsip demokrasi. Fenomena yang terjadi di Indonesia praktik etika politik yang berdasarkan Pancasila sudah sangat memudar, hal ini terlihat dari bagaimana para elit penguasa cenderung membenarkan segala cara untuk memenuhi kepentingan mereka yang tidak pernah terpuaskan. Para elit politik seakan tidak lagi mengamalkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam urusan politik di tingkat nasional. Persoalan etika ini sangat penting dalam interaksi sosial karena setiap tindakan manusia memiliki dampak yang sejalan dengan sifatnya. Dimana tindakan yang baik akan menghasilkan dampak yang baik, begitu juga sebaliknya. Nilai-nilai ini tercermin dalam Pancasila sebagai panduan etika politik dan hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki peran krusial dalam memperkuat etika politik, sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif di Indonesia. Sebagai landasan bagi penguatan sistem demokrasi, Pancasila menegaskan bahwa setiap tindakan politik, baik dalam skala domestik maupun internasional serta dalam bidang tata Kelola pemerintahan baik lingkup nasional maupun global harus memperoleh dukungan dari rakyat. Hal ini menunjukkan urgensi Pancasila dalam menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana semua keputusan, kebijakan dan kewenangan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

⁴⁸ Paulus I. Funome, Willy Tri Hardiyanto, Dody Setyawan (2012) Peran Etika Poltik Dalam Perumusan Kebijakan Publik <https://doi.org/10.33366/jisip.v1i2.34> diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 22.45 wib

Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia, memberikan pedoman filosofis yang kaya akan nilai-nilai moral dan etika dimana menjadi panduan bagi setiap warga negara terutama para pemimpin dan pelaksana pemerintahan. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial dan persatuan yang menjadi dasar bagi terbentuknya etika politik yang jujur dan terbuka. Prinsip gotong royong mengajarkan pentingnya kolaborasi dan saling bantu-membantu dalam mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan. Prinsip keadilan sosial menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan di seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai persatuan sebagai bagian dari Pancasila menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dalam keragaman.

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi. Demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik memerlukan fondasi moral yang kokoh dan dapat ditemukan dalam ajaran Pancasila. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, konsensus dalam pengambilan keputusan dan menghormati martabat manusia menjadi landasan yang memperkuat sistem demokrasi inklusif dan partisipatif. Sementara itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan yang tidak hanya menjamin transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan membantu menciptakan lingkungan di mana keadilan, kebenaran dan kepentingan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintah.

Pada bab III ini, akan diuraikan pembahasan terhadap tiga persoalan pokok sebagaimana dimaksud dalam Bab I yang dielaborasi dalam beberapa sub bab, yaitu : pengejawantahan nilai pancasila dalam mewujudkan etika politik saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan sistem demokrasi pada tata Kelola pemerintahan saat ini dan strategi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat adil dan

makmur. Pembahasan persoalan ini dianalisis dengan menggunakan pisau analisis Teori Etika Deontologi, Teori Demokrasi, Teori Pilihan Rasional dan Teori Nilai dengan menganalisis data dan fakta serta berpedoman pada Perundang-undangan terkait.

13. Pengejawantahan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik saat ini.

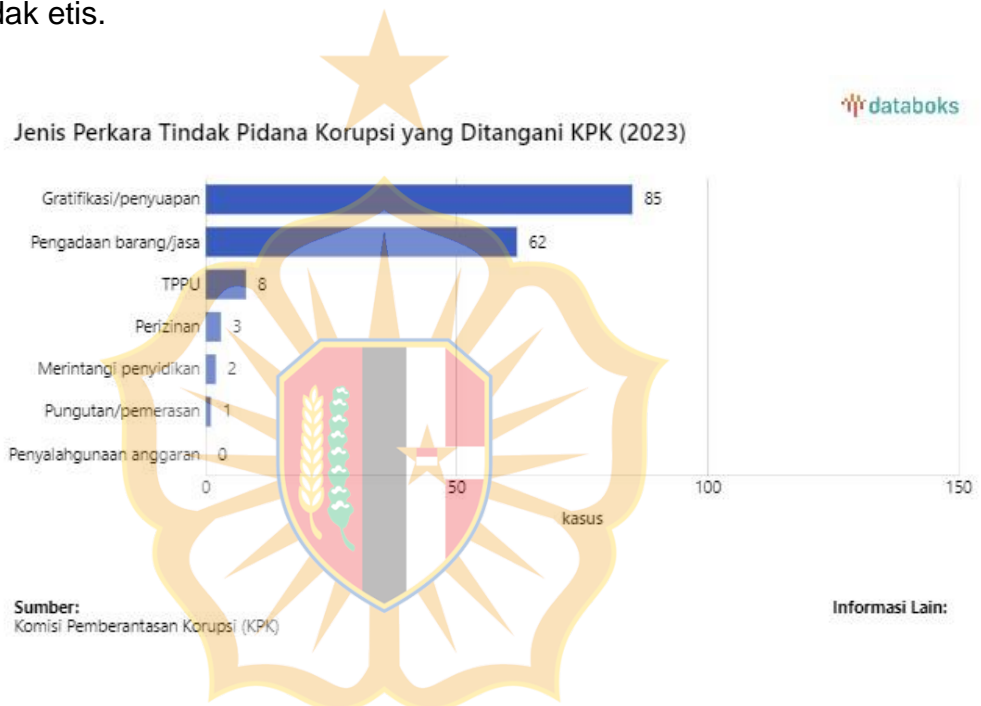
Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum tetapi juga menjadi sumber etika politik. Berbicara dalam konteks etika politik, Pancasila menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku termasuk asas legalitas, demokrasi dan moral. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang mencakup kekuasaan, kebijaksanaan yang berkaitan dengan publik dan pembagian kekuasaan harus berdasarkan legitimasi moral keagamaan, legalitas dan demokrasi. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, etika politik menghadapi tantangan baru seperti penyebaran informasi yang cepat dan luas serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi serta maraknya pengaruh budaya dari luar yang masuk ke Indonesia. Pancasila merupakan *Centre Of Gravity*, yang memiliki nilai krusial sebagai landasan dalam menjaga integritas dan etika politik. Pancasila memuat prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan yang menjadi prinsip dasar dalam membentuk etika politik yang adil dan bertanggung jawab.⁴⁹ Pancasila sebagai sumber sistem etika politik di Indonesia menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi kelangsungan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya:

- a. Dekadensi moral, terutama di kalangan generasi muda dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan negara. Globalisasi dan

⁴⁹ Jerry Indrawan, Astin Julia Rosa, Anwar Ilmar, Garcia Krisnando Nathanael (2021) *Journal of Political Issues* Volume 3, Nomor 1, Juli 2021 "Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber" <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/download/44/30> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.45 wib

pluralitas nilai menyebabkan tantangan dalam mempertahankan karakter bangsa. Dekadensi moralitas akan berdampak pada hilangnya etika, norma, mentalitas dan karakter bangsa Indonesia yang luhur.

- b. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia menjadi permasalahan serius yang mengganggu tata kelola negara dan pembangunan. Kurangnya rambu-rambu terhadap norma membuat penyelenggara negara sulit untuk membedakan tindakan yang etis dan tidak etis.



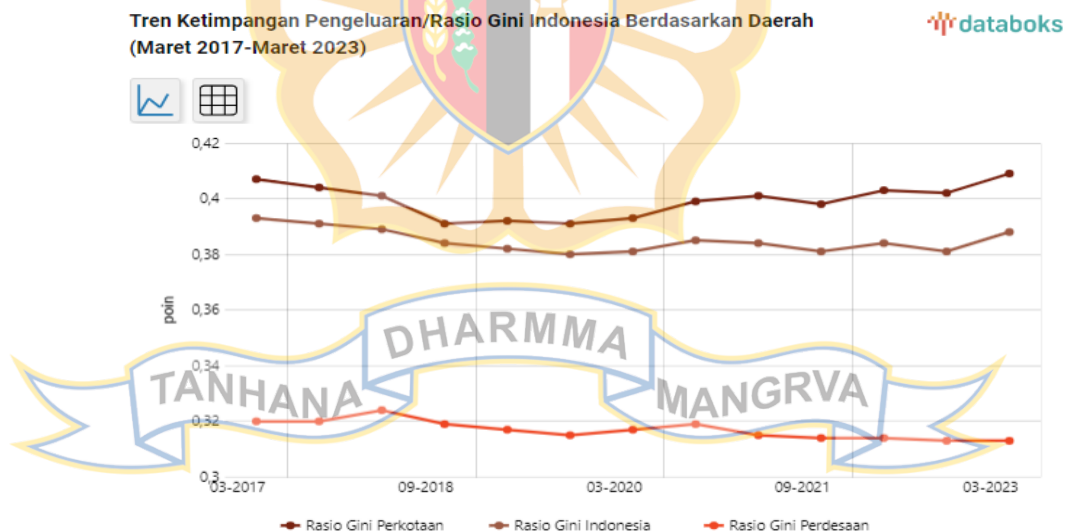
Sumber Databoks kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2023.



Selama tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 161 kasus tindak pidana korupsi. Kasus terbanyak adalah penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah 85 kasus, diikuti oleh korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebanyak 62 kasus. Disamping itu, KPK juga menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 8 kasus, korupsi dalam perizinan 3 kasus, perintang proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Mayoritas tindak pidana korupsi pada tahun tersebut ditemukan di instansi

pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 53 kasus, diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dengan 52 kasus, BUMN/BUMD dengan 34 kasus, dan pemerintah provinsi dengan 22 kasus. Dilihat dari profesi pelaku, korupsi pada tahun tersebut mayoritas dilakukan oleh pejabat eselon I, II, III, dan IV, yakni sebanyak 61 kasus. Selain itu, terdapat 57 kasus korupsi yang pelakunya berasal dari pihak swasta, 8 kasus yang melibatkan wali kota/bupati dan wakilnya, serta 4 kasus yang melibatkan kepala lembaga/kementerian. Terdapat juga kasus korupsi yang melibatkan gubernur, hakim, jaksa dan pengacara, masing-masing 2 (dua) kasus, serta anggota DPR dan DPRD masing-masing 1 (satu) kasus. Selain itu, terdapat 22 kasus korupsi yang melibatkan profesi lainnya.⁵⁰

- c. Pembangunan nasional masih menghadapi tantangan serius karena kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan.



Sumber Databoks Tren Ketimpangan Pengeluaran/Rasio Gini Indonesia Berdasarkan Daerah (Maret 2017-Maret 2023)

⁵⁰ databoks (2024) "KPK Tangani 161 Kasus Korupsi pada 2023, Gratifikasi Terbanyak" <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.00 wib

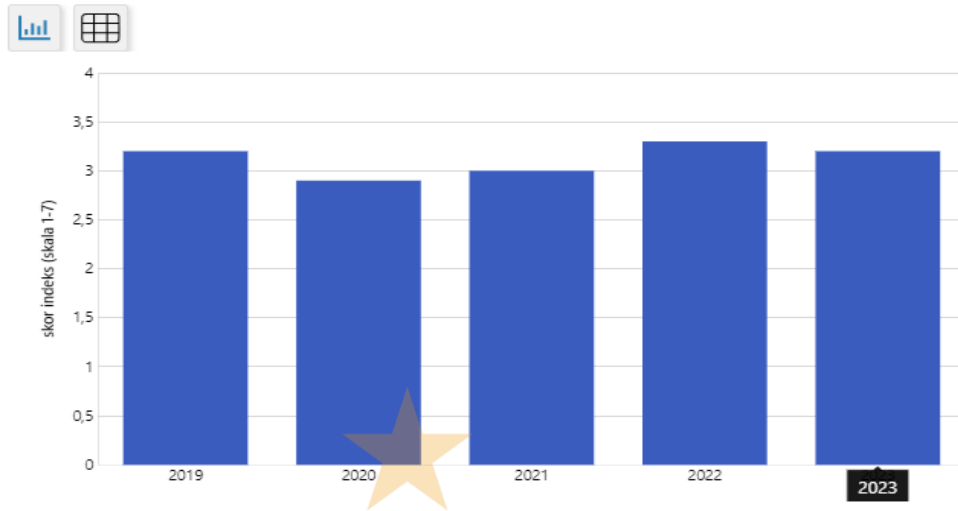
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengukur ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia dengan menggunakan Rasio Gini. Pada Maret 2023, angka tersebut mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin. Terjadi peningkatan sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan rasio Gini pada September 2022 yang mencapai 0,381. Selain itu, dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 0,384 poin, rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi sebesar 0,004 poin. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan rasio Gini di Indonesia berasal terutama dari perkotaan, dengan angka mencapai 0,409 poin pada Maret 2023. Angka ini naik 0,007 poin dari September 2022 (0,402) dan naik 0,006 poin dari Maret 2022 (0,403). Di sisi lain, rasio Gini di pedesaan tetap konstan antara September 2022 dan Maret 2023, dengan nilai 0,313 poin. Angka ini bahkan mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dari kondisi Maret 2022 yang mencapai 0,314 poin. BPS mencatat bahwa secara nasional, rasio Gini mengalami penurunan sejak Maret 2017 hingga September 2019, menunjukkan perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia selama periode tersebut. Ini diungkapkan dalam laporan BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023.⁵¹ Rendahnya rasio gini di Indonesia merefleksikan tata kelola pemerintahan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, hal mana menandakan tidak diejawantahkannya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi perhatian utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, akibat lemahnya apresiasi terhadap hak asasi manusia oleh sebagian individu.

⁵¹ Databoks (2023) “ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.15 wib

Skor Indeks HAM Indonesia menurut Setara Institute (2019-2023)

databoks



Sumber Databoks Skor Indeks HAM Indonesia menurut Setara Institute (2019-2023).

Pada tahun 2023, kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) mengalami penurunan. Ini tercermin dalam laporan Indeks Hak Asasi Manusia 2023 oleh Setara Institute yang berjudul "Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi" yang dirilis pada Desember 2023. Indonesia memperoleh skor Indeks HAM sebesar 3,2 pada tahun tersebut, menurun dari skor 3,3 tahun sebelumnya. Penurunan skor ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama. Pada periode Januari-Juni 2023, terdapat 155 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya terdapat 90 kasus serupa. Beberapa contoh kasus yang terjadi pada tahun tersebut termasuk penolakan pendirian rumah ibadah dan pemaksaan atribut keagamaan di lingkungan pendidikan. Penurunan skor Indeks HAM Indonesia 2023 juga dipengaruhi oleh konflik di Papua, pembentukan Perppu Cipta Kerja yang dianggap mengabaikan partisipasi masyarakat, masih adanya kekerasan terhadap jurnalis serta kriminalisasi berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selama tahun 2023, terjadi pembungkaman aspirasi masyarakat dalam konteks eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN), pembubaran diskusi

publik dan pembatasan kebebasan akademis.⁵² Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, mencirikan kurangnya pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi di Indonesia.

- e. Eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan memberikan dampak serius terhadap kehidupan manusia, termasuk kesehatan, transportasi, perubahan iklim dan lain-lain. Hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, sebagai dampak faktual dari tidak diejawantahkannya nilai luhur Pancasila.

Perubahan dalam politik di Indonesia tidak hanya mempengaruhi perilaku para politisi, partai politik, elit politik, dan penguasa, tetapi juga mengubah cara masyarakat Indonesia memahami esensi politik. Konflik antar lembaga negara, kasus korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran melibatkan pejabat negara dalam narkoba dan asusila, yang terjadi di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, mencerminkan hilangnya etika dan moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang ada dalam dunia politik saat ini seringkali tidak memiliki nilai yang kuat, sehingga perilaku politisi dan pejabat negara seringkali tidak mengindahkan etika politik. Beberapa penyebab terjadi penyimpangan nilai Pancasila dalam mewujudkan etika politik saat ini antara lain:

- a. Kesejahteraan sosial di Indonesia masih bermasalah, seperti kehidupan yang adil Makmur, ketersediaan sumber daya, kesehatan, dan Pendidikan.⁵³
- b. Transparansi dan keadilan di Indonesia masih bermasalah, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penegakkan hukum, dan keterbatasan hak asasi.

⁵² Kompas.com (2023) "Skor Indeks HAM Indonesia 2023" <https://lestari.kompas.com> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.45 wib

⁵³ Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M.(2023) berita "Tantangan Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Harus Dijawab dengan Langkah Nyata" <https://www.mpr.go.id> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.55 wib

- c. Pemilihan Umum di Indonesia yang meninggalkan banyak permasalahan, seperti kompleksitas penyelenggaraan yang disinyalir banyak kecurangan, isu politisasi dan kampanye hitam, praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih dan kondisi dalam proses pemungutan suara.
- d. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih bermasalah, seperti ketersediaan hukum, ketersediaan pengadilan, dan ketersediaan penegakan hukum.
- e. Partisipasi masyarakat di Indonesia masih bermasalah, seperti ketersediaan informasi, ketersediaan peluang partisipasi, dan ketersediaan pengadilan.
- f. Implementasi Pancasila sebagai etika politik di Indonesia masih bermasalah, seperti ketersediaan kurikulum pendidikan, ketersediaan pendidikan dan latihan, ketersediaan pengembangan karakter dan ketersediaan pengembangan kemahasiswaan.
- g. Pemahaman dan pengertian Pancasila di Indonesia masih bermasalah, salah satu permasalahannya adalah masih adanya intoleransi dan degradasi nilai-nilai Pancasila, seperti saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan Tunggal Ika yang terus mengalami degradasi di kalangan masyarakat bangsa Indonesia terutama di kalangan kaum muda.⁵⁴ Selain itu, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, seperti ketimpangan sosial yang menjadi dilema ketika menerapkan sila kelima Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

⁵⁴ Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M.(2023) berita "Tantangan Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Harus Dijawab dengan Langkah Nyata Andra Baktiono Hidayat(2023) :”Pancasila Dalam lintas Waktu : Pemahaman dan Pengalamannya” <https://www.unja.ac.id> diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 20.45 wib

Sebagaimana dalam Teori Nilai, dimana Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Nilai luhur Pancasila diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih dimana sila tersebut melekat pada setiap insan, sehingga nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikelompokkan kepada tiga macam nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Teori nilai yang dikelompokkan tersebut memainkan peran penting dalam mewujudkan etika politik saat ini, masing-masing kategori nilai tersebut antara lain:

- 1) Nilai Dasar. Nilai dasar merupakan esensi, hakikat, inti, atau makna dalam dari nilai-nilai tersebut. Bersifat universal karena berkaitan dengan realitas objektif dari segala sesuatu. Pancasila memiliki value sebagai dasar yang diakui sebagai prinsip yang mutlak. Nilai-nilai dasar Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Esensi dari nilai dasar adalah bagian universal dari sila-sila Pancasila, yang mencakup cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang benar. Nilai dasar Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang tidak dapat dibahas lagi, menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam politik. Nilai dasar dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan politik yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.
- 2) Nilai Instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan nilai dasar. Dalam konteks Pancasila, nilai instrumental merujuk pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi alat atau sarana untuk menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai instrumental dapat berupa peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Dalam etika politik, nilai instrumental Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang dapat

disempurnakan dan diubah seiring dengan perkembangan waktu dan kondisi. Nilai instrumental dapat digunakan sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik, seperti melalui perumusan peraturan pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- 3) Nilai Praksis. Nilai praksis adalah penerapan lebih lanjut dari nilai instrumental dalam konteks kehidupan yang konkret. Dalam konteks Pancasila, nilai praksis merujuk pada implementasi nilai-nilai instrumental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis ini dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan berbangsa. Dalam etika politik, nilai praksis Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang dapat berubah dan disempurnakan seiring dengan perkembangan waktu dan kondisi. Nilai-nilai praksis dapat digunakan sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik, seperti melalui interaksi antara nilai-nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu.

Nilai-nilai Pancasila menunjukkan ciri universalitas yang mencerminkan semangat humanisme, sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan. Meskipun demikian, penerimaan Pancasila tidaklah segera diraih oleh semua negara. Perbedaannya terletak pada konteks sejarah di mana nilai-nilai tersebut disusun dan diakui secara sadar sebagai satu kesatuan yang menjadi dasar perilaku politik dan moral bangsa. Pancasila merupakan warisan khas Indonesia yang menjadi ciri identitas bangsa, diperkuat oleh dukungan moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri.

Nilai-nilai khusus yang tercantum dalam Pancasila tercermin dalam setiap silanya. Sebagai prinsip dasar yang mendasar, Pancasila merupakan serangkaian nilai yang menyeluruh mengenai kehidupan bersama, kebangsaan, dan kenegaraan. Pancasila bersama dengan Pembukaan UUD 1945 dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar negara yang fundamental

karena mereka mengandung konsep-konsep yang menjadi dasar pembentukan negara dan penetapan undang-undang dasar.⁵⁵

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, semua aspek yang terkait dengan kekuasaan, kebijaksanaan yang bersentuhan dengan kepentingan publik, dan pembagian kewenangan harus didasarkan pada legitimasi moral dan religius. Prinsip ini sesuai dengan ajaran sila pertama Pancasila, yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, yang menuntut perlakuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penyelenggaraan negara juga harus mematuhi prinsip legalitas, sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, keadilan sosial, yang merupakan tujuan dari kehidupan negara, sejalan dengan sila kelima Pancasila, menjadi hal yang sangat penting. Setiap kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dengan mengikuti prinsip legalitas. Pentingnya peran rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara tercermin dalam sila keempat Pancasila. Dalam praktek politik, semua hal yang terkait dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus didasarkan pada legitimasi yang diberikan oleh rakyat, atau yang dikenal sebagai legitimasi demokrasi. Setiap kebijakan yang diambil, baik dalam konteks politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi nasional maupun global, serta hal-hal lain yang mempengaruhi kehidupan rakyat, harus mendapatkan legitimasi dari rakyat. Sebagai contoh, kebijakan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif dasar listrik, tarif telepon, kebijakan ekonomi mikro dan makro, serta reformasi infrastruktur politik, semuanya harus didasarkan pada legitimasi hukum, demokrasi, dan moral, agar tetap sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

⁵⁵ Drs. H. Karmin, M.H. (2023) "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum Di Indonesia" <https://pa-bojonegoro.go.id> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.55 wib

Pancasila sebagai sebuah kerangka etika memiliki lima prinsip yang terjabarkan sebagai berikut. Pertama, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi ketuhanan, di mana keberadaan agama diakui sebagai sumber nilai-nilai moral yang menjadi pertimbangan fundamental dalam pembuatan keputusan politik. Kedua, esensi kemanusiaan menjadi dasar bagi etika politik demokrasi, dengan menekankan pentingnya sikap adil dalam pertimbangan moral sebelum bertindak, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Ketiga, prinsip persatuan dan kesatuan mendorong sistem etika politik yang mengutamakan kepentingan umum, solidaritas kebangsaan dan rasa kebersamaan serta menolak kepentingan politis yang egois. Keempat, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi kerakyatan, di mana keputusan mufakat diperoleh melalui dialog-dialog akademis dan pengembangan kesadaran warga negara terhadap nilai-nilai budaya kerakyatan. Kelima, esensi keadilan sosial menekankan bahwa tujuan perjuangan bukan hanya pencapaian keadilan, tetapi juga proses pencapaiannya harus memperhatikan nilai keadilan sebagai prioritas utama.⁵⁶

Menurut Ruslan (2013), Pancasila adalah konsep pemikiran yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁷ Setiap elemen yang tersirat dalam nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai mulia yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Kelima prinsip Pancasila diharapkan dapat menggabungkan berbagai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Proses perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 melibatkan serangkaian perundingan yang panjang oleh para pendiri bangsa untuk mencapai kesepakatan final. Serangkaian nilai yang bersifat universal, Pancasila memiliki berbagai peran dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia, termasuk sebagai panduan hidup bangsa, dasar negara, sumber utama hukum, dan pengikat dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

⁵⁶ Runi Hariantati(2023) Jurnal Demokrasi “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”
<https://ejournal.unp.ac.id> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.15 wib

⁵⁷ Honest Dody (2011) “Membangun Peradaban Bangsa dengan Pancasila”
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105833> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.05 wib

Keberadaan Pancasila seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan di dalam hati setiap warga negara, karena peran-peran tersebut berasal dari keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Perbedaan juga terjadi dalam pandangan politik masyarakat Indonesia, yang dianggap sebagai masalah krusial yang harus diatasi dengan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.

Mengatasi kondisi pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan di Indonesia, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, keadilan, Demokrasi, dan kemanusiaan sebagai landasan negara. Peran media massa dan budayawan yang masih memegang prinsip-prinsip idealisme juga penting dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan kesadaran nasional yang kuat. Peran TNI dan Polri dapat memberikan teladan dalam praktik politik dengan menunjukkan netralitas, integritas, profesionalisme dan tanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Selain itu dapat membantu memperkuat etika politik dan mengurangi praktik-praktik yang merugikan sistem Demokrasi dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila.⁵⁸ Lemhannas RI dapat menjadi salah satu pilar yang kuat dalam pengejawantahan nilai Pancasila, mewujudkan etika politik yang baik, dan memperkuat sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis bagi negara Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Winarno, Armaidly Armawi(2018) Hubungan TNI-Polri dalam sistem perlindungan dan keamanan Indonesia pasca reformasi <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40640> Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 10.10 WIB

⁵⁹ Maksum Rangkuti (2023) "Pancasila : Fungsi dan Peranannya" <https://fahum.umsu.ac.id/pancasila-fungsi-dan-peranannya/> Diakses pada 1 Maret 2024 pukul 09.00 WIB

Menghadapi dan menanggapi urgensi etika politik, pemahaman dan penguatan nilai-nilai Pancasila sangatlah diperlukan tidak hanya dipahami namun dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila Pancasila menjadi panduan dalam menjalankan etika politik di Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan ketaatan terhadap Tuhan dalam menjalankan etika politik. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menuntut tanggung jawab moral individu dalam etika politik. Sila Persatuan Indonesia mengarahkan pada kesatuan dan menekan konflik politik. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan memperkuat prinsip demokrasi dan keadilan dalam etika politik. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya etika politik dalam mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, memiliki peran penting dalam mengendalikan paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan agama. Masyarakat diharapkan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kesatuan yang utuh serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus dijalankan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan pandangan, keyakinan dan cita-cita bangsa Indonesia yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.

14. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan sistem demokrasi pada tata Kelola pemerintahan saat ini.

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang dipandu oleh kebijaksanaan yang luhur melalui proses musyawarah bermufakat dan perwakilan, dimana berakar pada prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai hasilnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi fondasi negara. Tiap-tiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang setara dan bersatu dalam gagasan demokrasi. Pancasila memiliki peran

utama dalam domain politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam menangani berbagai isu nasional melalui proses musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menekankan pada kedaulatan rakyat dan partisipasi publik, merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang adil dan transparan. Penguatan sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahan merupakan tujuan strategis yang penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berfungsi secara efektif dan akuntabel. Di tengah perubahan global yang terus berlanjut, ada banyak faktor yang mempengaruhi cara sistem demokrasi diperkuat dan diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan saat ini. Dinamika global dan hubungan internasional turut mempengaruhi penguatan demokrasi. Dukungan internasional, pertukaran pengalaman, dan pengaruh dari negara-negara demokratis lain dapat membantu dalam proses reformasi dan penguatan sistem demokrasi. Namun, pengaruh dari kekuatan eksternal dan globalisasi juga perlu dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga. Begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan pada sistem demokrasi. Digitalisasi dan media sosial mengubah cara informasi disebarluaskan dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi; di sisi lain, tantangan seperti penyebaran informasi yang salah dan pengaruh luar dalam proses pemilihan dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Kualitas institusi demokrasi itu sendiri memainkan peran penting. Institusi yang kuat, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta mekanisme check and balance yang efektif, diperlukan untuk menjaga integritas sistem demokrasi. Reformasi institusi dan peningkatan kapasitas kelembagaan seringkali menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan secara adil. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan publik adalah aspek krusial dalam penguatan sistem demokrasi. Masyarakat yang aktif dan terlibat dalam proses politik serta pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Program-program

pendidikan politik dan peningkatan kesadaran publik tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi juga menjadi faktor penting dalam membangun partisipasi yang efektif. Kualitas institusi demokrasi itu sendiri memainkan peran penting. Institusi yang kuat, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta mekanisme check and balance yang efektif, diperlukan untuk menjaga integritas sistem demokrasi. Reformasi institusi dan peningkatan kapasitas kelembagaan seringkali menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan secara adil.

Demokrasi Pancasila menggambarkan tujuan dan nilai-nilai yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Dalam Tap MPRS Nomor XXXVII/MPRS/1968, istilah ini secara resmi digunakan untuk menjelaskan proses musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mufakat atau kesepakatan. Kedaulatan mutlak dipegang oleh rakyat yang menjadikan mereka sebagai penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak memuaskan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga pemerintah di Indonesia wajib mematuhi konstitusi yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar tahun 1945, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan untuk mencegah pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga rakyat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan memiliki sejumlah kelebihan, antara lain:

- a. Kedaulatan rakyat yang penuh, dimana dalam sistem pemerintahan, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mereka memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
- b. Kepatuhan terhadap konstitusi, dimana Lembaga pemerintah di Indonesia wajib mengikuti konstitusi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini

mencegah sistem pemerintahan untuk bertindak semena-mena, sehingga rakyat memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

- c. Pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, terbuka, jujur, dan adil yang setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan keinginan rakyat.
- d. Pengambilan keputusan melalui diskusi dan kesepakatan bersama, memastikan bahwa setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan mengedepankan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
- e. Menghargai HAM dan toleransi antara warga negara untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
- f. Prioritas pada kepentingan rakyat, berarti setiap keputusan yang diambil oleh wakil harus didasarkan pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
- g. Tidak menganut sistem partai tunggal karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, namun pemilu melibatkan berbagai macam partai politik yang berpartisipasi.

Indonesia telah mengalami transformasi demokrasi yang signifikan di tingkat regional dan global. Meskipun demikian, proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung dengan berjuang melawan korupsi yang masih merajalela, meningkatkan tata kelola pelayanan publik dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pemerintah Indonesia telah mengutamakan penguatan lembaga-lembaga penegak demokrasi yang sejalan dengan tujuan bersama untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi.

Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang didasarkan pada Pancasila, negara ini menunjukkan komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman sekarang. Tantangan ini harus diatasi bersama oleh seluruh

rakyat untuk memperkuat dan meningkatkan sistem demokrasi. Sejak era Reformasi, masih terdapat beberapa catatan penting terkait proses demokratisasi yang perlu diperbaiki, antara lain:

- a. Isu korupsi masih tetap menjadi tantangan besar di bidang politik Indonesia, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan.
- b. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi menjadi tantangan serius, dengan ketimpangan pendapatan dan akses ke lapangan kerja yang mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat. Faktor-faktor seperti ketimpangan regional, disparitas pendidikan, akses ke lapangan kerja, serta sistem pajak dan kebijakan ekonomi turut berperan dalam masalah ini.
- c. Politik identitas yang seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat dan memperoleh dukungan politik. Strategi ini menggunakan perbedaan identitas seperti agama, etnisitas, ras, atau gender untuk kepentingan politik. Dampak negatifnya terasa dalam bentuk polarisasi masyarakat dan peningkatan ketegangan antar-grup, yang dapat menyebabkan konflik sosial dan merugikan stabilitas serta persatuan nasional.
- d. Masalah lingkungan di Indonesia yang menimbulkan tantangan serius, mencakup deforestasi, kebakaran hutan, perubahan iklim, serta polusi air dan udara. Praktik deforestasi ilegal dan eksploitasi berlebihan menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat satwa liar yang signifikan. Kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, sering kali dipicu oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Polusi air dan udara juga menjadi permasalahan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, karena limbah industri, penggunaan kendaraan bermotor, dan pembangunan yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

- e. Pendidikan masih banyak tantangan yang harus dihadapi terkait akses dan kualitas layanan di Indonesia. Walaupun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan, masih banyak daerah khususnya pedesaan dan terpencil yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan berkualitas. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan yang merata. Meskipun terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah, kualitas pendidikan masih menjadi perhatian utama di beberapa wilayah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, tingkat putus sekolah di Indonesia mencapai 1,28 persen. Kondisi ini merupakan proporsi dari populasi usia 7-24 tahun yang seharusnya bersekolah namun tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Angka putus sekolah di Indonesia juga menunjukkan angka yang tinggi, terutama di tingkat pendidikan dasar. Pada tahun yang sama, tingkat putus sekolah di jenjang SD/MI/ sederajat mencapai 0,72 persen, di SMP/MTs/ sederajat sebesar 0,99 persen, dan di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 1,38 persen.⁶⁰
- f. Radikalisme dan ekstremisme dimana aktivitas radikal dan ekstrem sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat, mengancam stabilitas keamanan negara dan cenderung memecah belah masyarakat dengan menciptakan perpecahan antara kelompok sehingga menghasilkan polarisasi politik dan sosial yang dapat menghambat upaya kolaboratif dalam proses demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, sebagaimana teori Demokrasi dalam penguatan sistem demokrasi pada tata kelola pemerintahan merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil dan aktor politik lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yaitu Kedaulatan Rakyat, Partisipasi, Keterwakilan (*Representasi*), Transparansi, Akuntabilitas,

⁶⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) "Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 - 23 Tahun pada 2023" Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) "Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 - 23 Tahun pada 2023" <https://dataindonesia.id> diakses pada tanggal 24 April 2024 pukul 20.05 wib

Kebebasan (*Freedom*), Pengawasan (*Checks and Balances*), Penghormatan terhadap Hukum (*Respect for the Law*), Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).⁶¹ Melalui teori tersebut beberapa langkah yang dapat diambil dalam penguatan sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahan adalah:

a. **Kedaulatan Rakyat.** Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPR dan MPR terhadap kebijakan pemerintah.
- 2) Meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti hak untuk berpendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.
- 3) Meningkatkan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui sistem pengembangan perwakilan yang adil dan transparan.

b. **Partisipasi (*Participation*).** Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan merupakan elemen penting dalam penguatan sistem demokrasi, upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan proses perencanaan regulasi serta program pemerintah sampai dengan pengambilan Keputusan.

⁶¹ Maksum Rangkuti (2023) Opini "Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya" <https://fahum.umsu.ac.id> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.34 wib

- 2) Meningkatkan transparansi dalam kegiatan pemerintahan dapat dilakukan dengan cara memberikan akses informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan pemerintahan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintahan dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintahan.

c. **Transparansi.** Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan adalah kunci dalam penguatan sistem demokrasi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan menjaga kebijakan pemerintah secara jelas, upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi seperti situs web, aplikasi, dan media sosial sebagai sistem informasi publik untuk mempublikasikan informasi tentang keputusan, rencana, dan aktivitasnya dalam membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan proporsional.
- 2) Keterbukaan dokumen sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk memahami keputusan yang diambil.
- 3) Melaksanakan pengawasan independen oleh lembaga-lembaga yang tidak terikat dengan pemerintah dalam melakukan inspeksi dan audit untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas.

d. **Akuntabilitas.** Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya, upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas tentang keputusan dan tindakan pemerintah, serta proses pengambilan Keputusan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti pertemuan publik, konsultasi, dan referendum.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan cara mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah secara terbuka dan transparan, serta memberikan konsekuensi bagi pemerintah yang tidak mencapai target.

e. **Kebebasan** (*Freedom*). Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan mengembangkan diri secara bebas, upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta menjamin keberadaan lembaga desa yang inklusif dan demokratis.
- 2) Menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi keuntungan, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan Keputusan.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan global yang berkelanjutan, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

f. **Pengawasan** (*Checks and Balances*). Prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan dan keseimbangan antara lembaga-lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terlalu kental di tangan satu pihak, upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Memaksimalkan gagasan demokrasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada aspek prosedural, seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia, seperti Agus Salim yang mendukung gagasan mengenai lembaga perwakilan yang dipilih dan diisi oleh rakyat.
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk menjamin kebebasan sipil dan masyarakat dalam menjaga berjalannya substansi demokrasi.
 - 3) Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, ketanggapan, kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
- g. **Penghormatan terhadap Hukum (*Respect for the Law*)**. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, upaya yang dapat dilakukan antara lain:
- 1) Memastikan penegakan hukum yang efektif dan independen, mencakup pengawasan ketat terhadap pelanggaran terhadap tindakan hukum secara adil dan transparan.
 - 2) Mengembangkan sistem peradilan yang efektif dan independen dengan melibatkan pengembangan sistem peradilan yang memiliki kekuatan untuk menghukum pelanggaran hukum, serta memiliki prosedur yang jelas dan transparan.
 - 3) Pengembangan kualitas lembaga perwakilan untuk pengembangan sistem pemilihan yang jujur dan transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap kegiatan lembaga perwakilan.

h. **Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)**. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini memastikan bahwa kepentingan rakyat diprioritaskan dan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan melalui pertemuan, konsultasi masyarakat, dan referendum.
- 2) Meningkatkan keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan hak-hak mereka melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Meningkatkan organisasi masyarakat yang aktif dan berdaya guna dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat.

i. **Pengaruh Budaya Global (*Global Cultural Influence*)**. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga, mempertahankan dan mengamalkan budaya luhur khas bangsa Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Hal ini merupakan keniscayaan bahwa pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjamin pencapaian tingkat Ketahanan Nasional yang tinggi di Indonesia, mengingat Pancasila adalah *Centre Of Gravity* bangsa yang bernilai sangat strategis. Pancasila dapat membangun karakter masyarakat dan bangsa yang kuat dalam menangkal pengaruh budaya global, dengan upaya antara lain :

- 1) Meningkatkan budaya literasi secara inklusif dan memasukkan kembali materi Pancasila dalam kurikulum Lembaga Pendidikan di segala jenjang secara konsisten dan berkomitmen.
- 2) Membangun budaya Pancasila sebagai satu-satunya budaya yang tepat diterapkan di Indonesia dengan keberagamannya.

- 3) Kementerian / Lembaga terkait, memfilter dan menangkal pemberitaan melalui media cetak, elektronik dan media sosial, informasi-informasi berita yang dapat menghancurkan mental karakter bangsa.

15. Strategi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur.

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, demokrasi telah menjadi salah satu nilai dasar yang diterima oleh masyarakat internasional sebagai cara terbaik untuk mengatur negara dan memastikan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan dapat meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa kepentingan rakyat diprioritaskan. Penguatan sistem demokrasi juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak negara di dunia yang masih perlu berdemokrasi secara ideal sebagai konsekuensi dari kompleksitas penerapannya menghadapi segala dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk Indonesia yang sejak tahun 1998 masih perlu terus belajar mencari dan menerapkan sistem demokrasi yang ideal, agar keterpurukan demokrasi yang disebabkan oleh beberapa faktor negatif diatas dapat teratasi. Hanya dengan menjalankan Demokrasi yang sehat, bersih dan ideal maka praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi informasi yang telah menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan bisa teratasi.⁶²

Sistem demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak

⁶² Arum Sutrisni Putri (2022) Kompas.com "Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-sekarang)" <https://www.kompas.com> diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 20.05 wib

untuk memilih pemimpin, mempengaruhi keputusan, dan mempertahankan hak-hak mereka. Sistem demokrasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, metode Analisis ASOCA sebagai pendekatan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Ermaya Suradinata pada tahun 2013 dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan.⁶³ Analisis ASOCA (*Ability, Strength, Opportunities, Culture, and Agility*) adalah sebuah pendekatan analisis yang digunakan untuk menemukan strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk sistem demokrasi. Dalam pelaksanaannya, secara terminologi ASOCA terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan sistem demokrasi adalah :

- a. **Kemampuan (*Ability*)**. Kemampuan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dasar dengan efektif dan efisien, termasuk proses legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemampuan ini juga mencakup kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Namun ada beberapa masalah yang dapat menghambat kemampuan tersebut, seperti:
 - 1) Ketidakseimbangan kekuasaan antara institusi-institusi pemerintahan sebagai konsekuensi dari multi partai yang diterapkan di Indonesia dapat menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif. Salah satu contoh konkret di mana kekuasaan eksekutif mendominasi atau mengendalikan terlalu banyak aspek dari pemerintahan dengan mengurangi independensi dan kekuatan legislatif dan yudikatif. Misalnya, dalam sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif memiliki kendali yang sangat besar atas proses legislatif, hal ini dapat menghambat

⁶³ E Suradinata – 2013 “Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan”
<http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/5956> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.30 wib

kemampuan legislator untuk melakukan fungsi pengawasan yang efektif terhadap pemerintah. Legislasi yang diajukan oleh eksekutif dapat diberlakukan tanpa peninjauan yang cermat atau perdebatan yang memadai di legislatif, mengurangi kualitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan.⁶⁴

- 2) Korupsi dan kurangnya integritas dalam pemerintahan dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan sumber daya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah. Permasalahan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah di bidang integritas pelaku pemerintahan, khususnya dalam hal korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Pada tahun 2023, kerugian negara masih cukup signifikan, mencapai 29.9 triliun rupiah⁶⁵, dan berdasarkan laporan Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) per Januari 2024, terdapat 61 kasus tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan jabatan.⁶⁶
- 3) Kurangnya kemampuan administratif dalam mengelola sumber daya dan proses pemerintahan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif. Masalah seperti birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kekurangan sumber daya manusia dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses politik dan pemerintahan dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk

⁶⁴ Ivan Doherty (2001), NDI Worldwide Published Journal of Democracy “*Democracy Out of Balance: Civil Society Can’t Replace Political Parties*” in the democracy_balance_indo PDF (www.ndi.org) diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.05 wib

⁶⁵ Willy Yashilva(2024) goodstats.id “Jumlah Kerugian Negara dalam Satu Dekade Terakhir Akibat Koruptor” <https://goodstats.id/article> diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.05 wib

⁶⁶ Nada Naurah (2024) goodstats.id “Ada 161 Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada 2023, Pelaku Didominasi PNS” <https://goodstats.id/article> diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.25 wib

memahami dan merespons kebutuhan dan aspirasi warga. Contoh kongkritnya, ketika tingkat partisipasi dalam pemilu rendah yang mengurangi legitimasi pemerintah yang terpilih, karena mereka mungkin tidak dianggap mewakili kepentingan mayoritas masyarakat

- b. **Kekuatan (*Strength*)**. Kekuatan sistem demokrasi merujuk pada dukungan publik, lembaga-lembaga yang stabil, dan proses politik yang dapat diandalkan dengan melibatkan kekuatan institusi demokratis, kebebasan berbicara, kebebasan pers serta kapasitas untuk menangani tantangan internal dan eksternal. Namun apabila terjadi penurunan dukungan publik terhadap sistem demokrasi akibat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi politik, krisis kepercayaan terhadap institusi, dan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Berdasarkan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 mencapai skor 34/100 dengan peringkat 115 dari 180 negara. Stagnasi dalam skor CPI tersebut menunjukkan bahwa respon terhadap praktik korupsi masih berlangsung lambat dan bahkan cenderung memburuk karena kurangnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan. Kecenderungan kurangnya respon terhadap pemberantasan korupsi semakin jelas terlihat, terutama setelah melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan munculnya berbagai regulasi yang mengabaikan integritas, serta sikap acuh tak acuh terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.⁶⁷
- c. **Peluang (*Opportunities*)**. Peluang untuk meningkatkan dan memperkuat sistem demokrasi dapat muncul dari perubahan sosial, ekonomi atau politik. Misalnya, peluang untuk reformasi institusi,

⁶⁷ *Transparency International (2024) "Corruption Perceptions Index 2023"*
<https://r.search.yahoo.com> diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.30 wib

pembaharuan undang-undang, atau partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik. Fenomena permasalahan dapat muncul dari perubahan sosial, ekonomi atau politik. Misalnya, perubahan sosial berupa ketidakpuasan yang luas terhadap kinerja pemerintah, ketidakmampuan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, atau kegagalan dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi. Kondisi-kondisi ini dapat memicu permintaan adanya reformasi institusi dan perubahan kebijakan. Dinamika ekonomi ketika terjadi Krisis ekonomi yang serius, seperti resesi atau inflasi tinggi, dapat mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan memicu permintaan untuk pembaharuan undang-undang ekonomi atau kebijakan fiskal yang lebih efektif, dan perubahan politik ketika konflik politik yang berlarut-larut atau polarisasi yang tinggi dalam masyarakat dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan memicu kebutuhan untuk reformasi politik yang lebih besar, termasuk pembaharuan undang-undang pemilu atau sistem partai politik.

- c. **Budaya (Culture).** Budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti penghargaan terhadap pluralisme, keadilan, toleransi dan partisipasi masyarakat yang aktif, yang mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan perlindungan hukum. Namun permasalahan terjadi ketika berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pluralisme, keadilan, toleransi, dan partisipasi masyarakat aktif, contohnya : Adanya sikap intoleransi terhadap perbedaan, baik itu berdasarkan suku, agama, etnis, gender, dan budaya. Polarisasi politik yang mengakibatkan konflik antar kelompok, menghalangi kompromi, dan menghambat kerja sama lintas partai. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, seperti parlemen atau lembaga penegak hukum. Ketidakadilan dalam akses terhadap proses politik, seperti pemilihan umum atau partisipasi dalam pembuatan kebijakan yang menghambat partisipasi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau politisi, seperti korupsi, nepotisme, atau

pelanggaran hak asasi manusia, dan Kurangnya pemahaman tentang proses politik dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi.

- d. **Kecerdasan (*Agility*)**. Kecerdasan yang merujuk pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dan kompleks dalam lingkungan politik, ekonomi dan sosial yang mencakup responsivitas terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola konflik dan ketidaksetaraan dengan bijaksana. Permasalahan terjadi ketika perubahan cepat dan kompleks dalam lingkungan politik, ekonomi, dan social, contohnya: perubahan ekonomi global yang cepat, seperti resesi ekonomi atau perubahan dalam pasar global misalnya, penurunan tiba-tiba dalam pasar keuangan global dapat memicu krisis ekonomi di tingkat nasional, kemajuan teknologi yang cepat, seperti revolusi digital atau kecerdasan buatan yang dapat mengubah lanskap ekonomi dan sosial dengan cepat. Perubahan dalam struktur sosial dan demografi, seperti usia produktif/nonproduktif penduduk, migrasi massal, atau perubahan nilai-nilai sosial, dapat menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola ketidaksetaraan, konflik, dan integrasi sosial. Perubahan iklim yang cepat dapat menyebabkan bencana alam yang serius dan berdampak luas, memerlukan respon cepat dan mitigasi yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Krisis politik, konflik sosial, atau perubahan rezim politik dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Tantangan global seperti pandemi COVID-19 memerlukan respon cepat dan adaptasi dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi kesehatan masyarakat, memulihkan ekonomi, dan mengatasi dampak sosial.

Analisis ASOCA (*Ability, Strength, Opportunities, Culture, and Agility*) adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi serta kualitas dalam sistem operasional organisasi. Untuk mewujudkan sistem demokrasi dapat dianalisis menggunakan metode analisis

ASOCA yang menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif dengan menggunakan kerangka kerja teoritis tertentu sebagai dasar untuk menganalisis data, namun juga terbuka terhadap temuan baru yang muncul selama proses analisis. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi dan memahami kompleksitas data kualitatif. Oleh karena itu, menggunakan analisis ASOCA dapat menentukan strategi dalam mewujudkan sistem demokrasi yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur, antara lain:

a. Kemampuan (*Ability*).

- 1) Kebebasan Berpendapat. Kemampuan untuk menyuarakan pendapat adalah aspek penting dalam demokrasi. Ini mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan menyampaikan ide tanpa rasa takut.
- 2) Pendidikan. Kemampuan menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara adalah kunci untuk memperkuat partisipasi dalam proses demokratis.
- 3) Teknologi Informasi. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir aksi politik.

b. Kekuatan (*Strength*).

- 1) Kebebasan Pers. Adanya kebebasan pers yang kuat dapat memungkinkan investigasi yang mendalam, mengkritisi pemerintah, dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat.
- 2) Pemerintahan yang Transparan. Sistem yang transparan memungkinkan warga negara untuk memantau tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas.

- 3) Partisipasi Aktif. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan kekuatan demokrasi, karena masyarakat aktif dalam mempengaruhi kebijakan dan proses politik.

c. Peluang (*Opportunities*).

- 1) Krisis sebagai Momentum Perubahan. Krisis seringkali menjadi peluang untuk melakukan perubahan. Krisis ekonomi, sosial, atau politik dapat membuka pintu bagi reformasi yang memperkuat demokrasi.
- 2) Globalisasi. Keterbukaan terhadap ide-ide dan praktik-praktik internasional dapat menginspirasi reformasi demokratis dan memperkuat sistem demokrasi lokal.
- 3) Peningkatan Kesadaran Politik. Meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dalam proses politik dan memperkuat demokrasi.

d. Budaya (*Culture*).

- 1) Penghargaan Terhadap Kebebasan dan Keadilan. Budaya yang menghargai nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan akan mendukung perkembangan sistem demokratis yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Toleransi dan Penghargaan terhadap Perbedaan. Budaya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keberagaman masyarakat dapat mengurangi konflik politik dan memperkuat demokrasi.
- 3) Kesadaran akan Hak Asasi Manusia. Budaya yang sadar akan hak asasi manusia akan mendukung perlindungan hak-hak individu dan memperkuat fondasi demokrasi.

e. Kecerdasan (*Agility*).

- 1) Kemampuan Beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan politik, sosial, dan ekonomi adalah kunci dalam mempertahankan keberlangsungan demokrasi.
- 2) Responsif terhadap Umpan Balik. Sistem yang mampu merespon umpan balik dari masyarakat akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara.
- 3) Kemampuan Kolaborasi. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dapat memperkuat dukungan untuk sistem demokratis.

Analisis ASOCA dalam strategi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang membawa pada kesejahteraan Masyarakat, keadilan dan kemakmuran secara Teori Pilihan Rasional untuk mencapai hasil dan tujuan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, hal ini dengan mengindikasikan beberapa elemen yang dapat diterapkan. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka menerapkan strategi ini antara lain:

- a. **Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat**, dengan memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi, hak-hak warga negara, dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Revitalisasi dan penguatan regulasi sistem politik Demokrasi Pancasila termasuk Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) untuk meningkatkan kualitas kader partai politik agar memiliki syarat menjadi wakil rakyat yang bermental spiritual matang, berintegritas, berkarakter baik, bermoral luhur dan berintelektualitas.
- 2) Memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang mencakup konsep dasar demokrasi, hak-hak warga negara, proses politik, sistem

politik, serta keterampilan partisipasi seperti pemilihan umum, debat publik, dan advokasi.

- 3) Melaksanakan pendidikan politik untuk kader partai politik agar memiliki jiwa kebangsaan yang bersendikan 4 Konsensus dasar (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika (BTI), NKRI), Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan bagi anggota parpol dan masyarakat umum.
- 4) Memanfaatkan media sosial dan kampanye informasi untuk menyebarkan informasi tentang demokrasi, hak-hak warga negara, dan proses politik berupa konten video pendek, infografis, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila.
- 5) Mengadakan forum diskusi publik yang terbuka untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemimpin politik, dan pakar-pakar politik dalam membahas isu-isu politik aktual, menyediakan ruang untuk bertukar pandangan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.
- 6) Berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan politik yang efektif dan inklusif dengan menggabungkan sumber daya dan pengalaman untuk mencapai lebih banyak orang dan memperluas dampaknya.
- 7) Mengorganisir kampanye sosialisasi yang intensif sebelum pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang mencakup edukasi tentang proses pemilihan, pentingnya hak suara, dan informasi tentang kandidat dan platform politik mereka.

- b. **Transparansi dan Akuntabilitas**, dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan dan institusi publik untuk

mengurangi praktek-praktek tak terpuji dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya melalui beberapa langkah seperti:

- 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap proses pemilu untuk membantu dalam menjamin bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan transparan.
- 2) Menerapkan undang-undang keterbukaan informasi publik yang memastikan bahwa informasi tentang kegiatan pemerintah dan penggunaan dana publik tersedia untuk umum yang mencakup pembuatan data anggaran, keputusan kebijakan, dan laporan keuangan publik secara transparan dan mudah diakses.
- 3) Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang terbuka dan kompetitif untuk memutus peluang praktik KKN dengan pengawasan secara ketat, termasuk dalam pemilihan kontraktor dan pemasok, serta evaluasi kinerja mereka.
- 4) Memperkuat sistem pelaporan keuangan yang jelas dan terperinci bagi pemerintah dan institusi publik dengan penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan terverifikasi secara independen.
- 5) Menetapkan sanksi yang tegas bagi pejabat pemerintah dan individu yang terlibat dalam tindakan korupsi atau pelanggaran etika lainnya untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum.
- 6) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan institusi publik dengan melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan kepada lembaga pengawas dan media independen.
- 7) Memasukkan pendidikan etika dan integritas ke dalam program pelatihan untuk pejabat pemerintah dan pegawai publik sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai moral dalam pelayanan publik dan menghindari konflik kepentingan serta perilaku koruptif.

- c. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**, dengan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- 1) Negara harus mengadopsi dan melaksanakan hukum Internasional yang relevan tentang hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi-konvensi HAM lainnya, termasuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi dan sistem hukum nasional.
 - 2) Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, termasuk melalui program pendidikan formal, kampanye sosialisasi, dan pelatihan bagi pejabat pemerintah, anggota kepolisian, dan anggota masyarakat sipil.
 - 3) Mengadopsi kebijakan dan program yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan suku, ras, agama, gender, disabilitas, atau status sosial lainnya yang mencakup legislasi anti-diskriminasi, program afirmatif, dan kampanye edukasi.
 - 4) Berpartisipasi dalam kerja sama Internasional untuk memperkuat perlindungan HAM, termasuk melalui dukungan terhadap mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi regional dan jaringan internasional.
 - 5) Membangun mekanisme pengawasan dan pelaporan yang transparan untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia dan memberikan akuntabilitas bagi pemerintah dan institusi terkait laporan tahunan HAM, forum konsultasi publik, dan akses yang mudah terhadap informasi HAM.
- d. **Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil**, dengan mendorong kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat

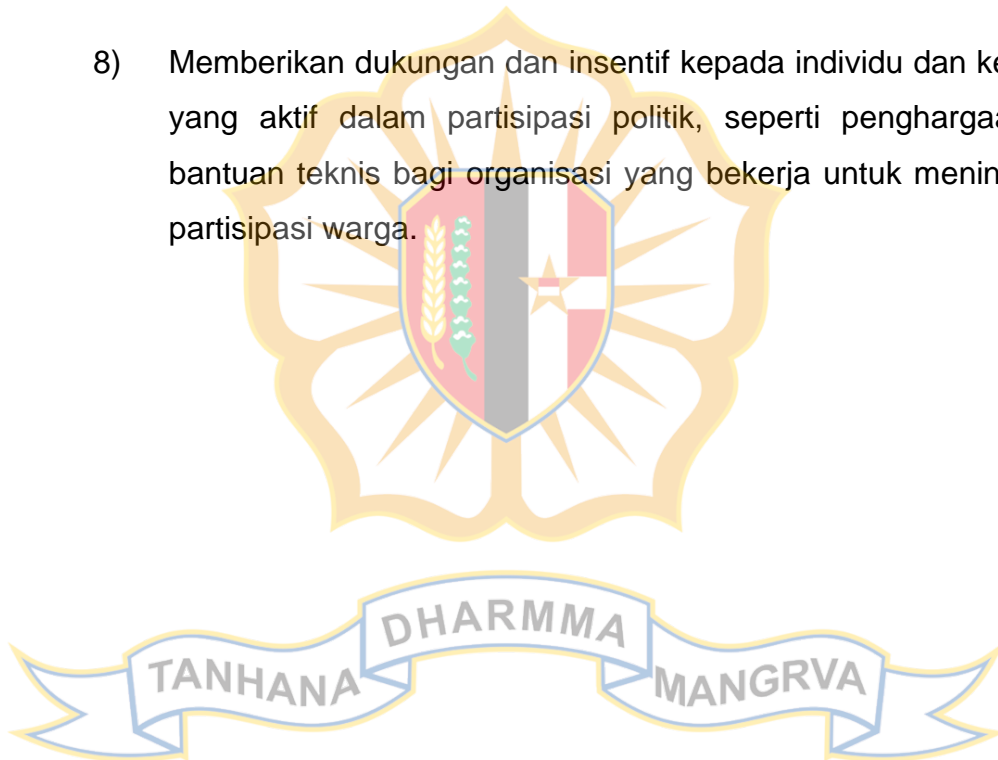
sipil dalam perumusan kebijakan dan implementasi program untuk memastikan representasi yang lebih luas dan keberlanjutan keputusan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Pemerintah dapat mendirikan forum konsultasi dan dialog yang teratur dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendengarkan masukan mereka tentang kebijakan yang sedang dirumuskan atau program yang akan diimplementasikan.
- 2) Memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui komite atau dewan konsultatif, atau melalui mekanisme partisipasi publik seperti forum diskusi atau konsultasi publik.
- 3) Pemerintah harus memberikan akses informasi yang lebih besar tentang kebijakan publik dan program-program yang sedang direncanakan atau dijalankan, sehingga organisasi masyarakat sipil dapat memberikan masukan yang relevan dan konstruktif.
- 4) Mendorong pemberdayaan kapasitas organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan, pendanaan, dan bantuan teknis yang dapat membantu mereka berperan secara lebih efektif dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi program.
- 5) Membangun kemitraan formal dan informal antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi, dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
- 6) Melakukan evaluasi dan monitoring bersama terhadap kebijakan dan program-program yang telah diimplementasikan dapat membantu memastikan akuntabilitas dan meningkatkan efektivitasnya.

- 7) Memastikan keberagaman dan representasi yang lebih luas dalam proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan keputusan yang diambil.
 - 8) Pemerintah harus mengakui dan menghargai peran penting yang dimainkan oleh organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan publik dan memperkuat demokrasi.
- e. **Penguatan Institusi Demokratis**, dengan menguatkan lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen, pengadilan independen, dan media yang bebas, untuk memastikan *checks and balances* yang efektif dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- 1) Memastikan independensi pengadilan agar penegakkan hukum dapat menjunjung rasa keadilan dalam mewujudkan tujuan hukum yang lebih luas dan fokus pada kepentingan masyarakat.
 - 2) Melakukan reformasi hukum untuk memperkuat kerangka hukum yang mendasari sistem demokratis, termasuk undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan.
 - 3) Memberikan lebih banyak kekuatan dan sumber daya kepada lembaga legislatif untuk memastikan peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Kondisi ini bisa meliputi peningkatan kapasitas anggota parlemen, memperkuat komite parlemen, dan memperluas peran parlemen dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.
 - 4) Memastikan kebebasan media untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan termasuk melindungi kebebasan berekspresi, menghentikan sensor dan tekanan terhadap media, serta mempromosikan pluralisme media secara positif dan baik.

- 5) Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika.
 - 6) Meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi publik yang dapat membantu memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
 - 7) Memperkuat kerjasama internasional dalam mendukung pembangunan institusi demokratis, termasuk melalui bantuan teknis, pertukaran pengalaman, dan pemantauan bersama.
- f. **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**, dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
- 1) Memberikan pendidikan politik dan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang proses pengambilan keputusan, isu-isu yang dibahas, dan cara mereka dapat terlibat secara efektif.
 - 2) Mendirikan forum publik dan konsultasi yang terbuka dan transparan, di mana warga dapat menyampaikan pandangan mereka, bertukar pendapat, dan memberikan masukan langsung kepada pembuat keputusan.
 - 3) Melibatkan warga dalam proses perencanaan pembangunan lokal dan nasional, termasuk dalam penentuan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.
 - 4) Membuka ruang bagi partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan, seperti referendum, inisiatif rakyat, atau mekanisme lain yang memungkinkan warga untuk memberikan suara langsung tentang isu-isu tertentu.

- 5) Memastikan bahwa perwakilan politik mencerminkan keragaman masyarakat, termasuk representasi dari berbagai kelompok etnis, gender, agama, dan latar belakang sosial-ekonomi.
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi partisipasi warga secara digital, seperti melalui *platform* daring untuk memberikan masukan atau polling elektronik.
- 7) Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka didengar.
- 8) Memberikan dukungan dan insentif kepada individu dan kelompok yang aktif dalam partisipasi politik, seperti penghargaan atau bantuan teknis bagi organisasi yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi warga.



BAB IV

PENUTUP

16. SIMPULAN

Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam iklim politik di Indonesia berada pada level yang sangat buruk dan jauh dari marwah Pancasila sebagai ajaran norma yang luhur milik bangsa Indonesia. Perilaku para politisi, partai politik, elit politik, dan penguasa mencederai etika dalam berdemokrasi, sehingga mengubah budaya masyarakat Indonesia untuk memahami esensi politik. Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam etika politik Indonesia saat ini menunjukkan kondisi yang sangat buruk dan jauh dari prinsip-prinsip luhur Pancasila. Ada beberapa aspek utama yang mencerminkan hal ini: **Pertama**, Pancasila yang seharusnya menjadi dasar hukum sekaligus sumber etika politik mulai dilupakan, mengakibatkan penurunan nilai-nilai moral dan norma-norma demokrasi yang terkandung di dalamnya; **Kedua**, Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan baru yang kompleks dalam implementasi etika politik. Penyebaran informasi yang cepat dan perubahan teknologi memperburuk situasi dengan melemahnya kultur budaya bangsa; **Ketiga**, masalah seperti dekadensi moral, korupsi, kurangnya partisipasi masyarakat, pelanggaran HAM, dan ketidakjujuran menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum diterapkan dengan baik dalam praktik politik; **Keempat**, meskipun nilai-nilai Pancasila penting untuk mewujudkan etika politik yang adil, peran tersebut belum dioptimalkan. Prinsip-prinsip moral, persatuan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila tidak dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Negara; **Kelima**, untuk membangun karakter politik yang baik dan bertanggung jawab, perlu ada penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Penguatan sistem demokrasi sangat bergantung pada implementasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila serta berbagai faktor internal dan eksternal. Beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan meliputi kedaulatan rakyat, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kebebasan, pengawasan, penghormatan terhadap hukum, dan pengembangan masyarakat, serta pengaruh budaya global. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya penguatan sistem demokrasi ini, seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, politik identitas, masalah lingkungan, pendidikan, radikalisme, dan ekstremisme.

Sistem demokrasi merupakan fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kemakmuran. Dalam era globalisasi yang dinamis, demokrasi diterima secara internasional sebagai cara terbaik untuk mengatur negara dan memastikan kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi informasi telah mengganggu sistem demokrasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang membawa kesejahteraan masyarakat, diperlukan beberapa strategi, antara lain:

- 1) Memperketat regulasi baik berupa Undang-Undang maupun aturan hukum di bawah Undang-Undang untuk memastikan konsep dan sistem politik Demokrasi Pancasila diterapkan dengan penuh etika, guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan ideal.
- 2) Memperkuat kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, termasuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan, korupsi, dan kekurangan kemampuan administratif.
- 3) Memperkuat dukungan publik, memastikan stabilitas lembaga-lembaga, dan menciptakan proses politik yang dapat diandalkan.
- 4) Menggunakan perubahan sosial, ekonomi, atau politik untuk meningkatkan dan memperkuat sistem demokrasi serta mengatasi tantangan seperti krisis ekonomi atau politik.

- 5) Mendorong budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti toleransi, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap kebebasan dan keadilan.
- 6) Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi perubahan cepat dan kompleks dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial.

17. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Etika Politik Dan Penguatan Sistem Demokrasi Guna Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini didisampaikan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan etika politik dan penguatan sistem demokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, antara lain sebagai berikut :

a. Mewujudkan Etika Politik

- 1) Presiden dan DPR RI mentransformasi Lemhannas menjadi lembaga negara atau Kementerian Ketahanan Nasional RI berada di bawah Presiden, yang membidangi urusan Ketahanan Nasional dimana Lemhannas dan Wantannas dapat menjadi Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) dari Kementerian Ketahanan Nasional RI.
- 2) Presiden dan DPR RI membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nasional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui diskusi dan simulasi yang dilaksanakan secara periodik dan berjenjang terkait dengan pelaksanaan Pemilu serta memberikan pedoman kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat.
- 3) DPR RI merevitalisasi Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) untuk meningkatkan kualitas organisasi dan kader partai politik agar

memiliki syarat menjadi wakil rakyat yang bermental spiritual matang, berkarakter baik, bermoral luhur dan berintelektualitas kecerdasan mumpuni.

- 4) Presiden dan DPR RI melibatkan Lemhannas RI dalam program pengembangan karakter dan moral kader partai politik yang fokus pada pengembangan etika, integritas, dan kejujuran, sehingga kader partai politik memiliki karakter dan moral yang baik, menjadi wakil rakyat dan pejabat yang dapat diandalkan dan berintegritas serta kenegarawan.

b. Penguatan Sistem Demokrasi

- 1) Pemerintah merevitalisasi undang-undang Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh perangkatnya sebagai penyelenggara Pemilu termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana menghilangkan Hak Suara Pilih kepada seluruh personel anggota KPU dan jajarannya secara temporer saat dilaksanakan kontestasi Pemilu dan Pemilihan Pilkada agar tercapai asas netralitas.
- 2) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat memasukkan pendidikan etika demokrasi dalam kurikulumnya untuk membangun pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik yang aktif.
- 3) Partai politik mendorong partisipasi politik, membangun kesadaran politik, dan memberikan alternatif kebijakan kepada masyarakat dengan memastikan internalisasi prinsip-prinsip demokrasi yang baik dalam struktur partainya sendiri.
- 4) Pemerintah dapat memperkuat sistem demokrasi dengan mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah kongkrit

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi.

c. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**

- 1) Pemerintah pusat dan daerah mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga memberikan akses terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran dan penggunaan sumber daya publik sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem demokrasi serta tata Kelola pemerintahan.
- 3) Pemerintah meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian Pembangunan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Penulis,


Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
Nomor Peserta 060

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>,
diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 09.55 wib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf,
diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00 wib

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2017>, diakses pada tanggal 30
Maret 2024 pukul 10.15 wib

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Nasional.
<https://uu.vlsm.org/Mpr/2001/Tap-Mpr-2001-006-Etika-Kehidupan-Berbangsa.pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.45 wib

2. BUKU

Yusriadi (2023) Buku *Reformasi Birokrasi dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.55 WIB.

Armaidly Armawi (2020) Buku *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 21.35 wib.

Mila Mumpuni (2023) Buku *Kepemimpinan Asli Indonesia*, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 22.25 wib

3. JURNAL

Cora Elly Novianti (2013) *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>,
Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.15 WIB

- Dwi Yanto (2017) *Etika Politik Pancasila* <https://core.ac.uk/download/pdf/327228215.pdf>, Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 09.29 WIB.
- Winarno, Armaidly Armawi (2018) *Hubungan TNI-Polri dalam sistem perlindungan dan keamanan Indonesia pasca reformasi* <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40640>, Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 10.10 WIB
- Maksum Rangkuti (2023) *Pancasila : Fungsi dan Peranannya* <https://fahum.umsu.ac.id/pancasila-fungsi-dan-peranannya/>, Diakses pada 1 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.
- Hasbullah (2020) *Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan* <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/3770>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 09.21 WIB.
- Handoyo, Eko (2020) *Etika Politik* Edisi Kedua <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/41840>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.
- Anugrah dwi (2023) *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya* <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 10.15 WIB.
- Natalia Gratia Sanding, Marlien Lopian, Josef (2018) *Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/19809/19406>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.23 WIB
- Wartiningsih (2021) *Apakah Tata Kelola Pemerintahan Dan Struktur Politik Mampu Menekan Kecenderungan Terjadinya Korupsi Di Indonesia?* https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/38397/20350 Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.43 WIB
- An'imah Maulida Ahadyah, Malinda Riska Aprilia, Shofi Aulia (2023) *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Dalam Membentuk Akhlak yang Baik* <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/744>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 09.45 wib.

- Chris Drake (2019) *Dimensi Geografis Semakin Pentingnya Indonesia di Dunia* <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/geographic-dimensions-of-indonesias-increasing-importance-in-the-world/>, diakses pada tanggal 3 April 2024 pukul 10.15 wib.
- Asep Saepudin Jahar (2023) *Etika Politik Berdemokrasi* <https://www.uinjkt.ac.id/id/etika-politik-berdemokrasi>, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 10.25 wib.
- Nyein Nyein Thant Aung (2023) *Indonesia Sebagai Kekuatan Tengah: Mengarungi Panggung Regional* <https://thesecuritydistillery.org/all-articles/indonesia-as-a-middle-power-navigating-the-regional-stage>, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 20.25 wib.
- Syahrul Akmal Latif, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy (2023) *Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua* <https://repository.uir.ac.id/22387/1/document-1.pdf>, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 22.45 wib.
- Paulus I. Funome, Willy Tri Hardiyanto, Dody Setyawan (2012) *Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik* <https://doi.org/10.33366/jisip.v1i2.34>, diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 22.45 wib.
- Julia Rosa, Anwar Ilmar, Garcia Krisnando Nathanael (2021) *Journal of Political Issues Volume 3, Nomor 1, Juli 2021 Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber* <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/download/44/30>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.45 wib.
- Andra Baktiono Hidayat(2023) :*Pncasila Dalam lintas Waktu : Pemahaman dan Pengalamannya*” <https://www.unja.ac.id>, diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 20.45 wib.
- Karmin (2023) *Implementasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Sumber Norma Hukum Di Indonesia* <https://pa-bojonegoro.go.id>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.55 wib.

Runi Hariantati (2023) *Jurnal Demokrasi Etika Politik dalam Negara Demokrasi* <https://ejournal.unp.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.15 wib.

Honest Dody (2011) *Membangun Peradaban Bangsa dengan Pancasila* <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105833>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.05 wib.

Maksum Rangkuti (2023) *Opini Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya* <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.34 wib.

E Suradinata (2013) *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan* <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/5956>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.30 wib

4. INTERNET

Kompas.com(2023) *Posisi Indonesia pada Indeks Demokrasi* https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/19/101215765/posisi-indonesia-pada-indeks-demokrasi#google_vignette, diakses pada 19 Maret 2024 pukul 19.15 WIB

Media Indonesia (2024) *Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia masih Cacat* <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>, Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 20.10 WIB.

Litbang Kompas (2024) *Urgensi Menjaga Etika Politik dan Demokrasi di Pemilu 2024* <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/05/urgensi-menjaga-etika-politik-dan-demokrasi-di-pemilu-2024>, Diakses pada 10 Maret 2024 pukul 09.30 WIB

Szalma Fatimarahma (2022) *Pengamat: Kampanye Minyak Goreng Zulkifli Hasan Langgar Etika Politik*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220712/15/1554229/pengamat-kampanye-minyak-goreng-zulkifli-hasan-langgar-etika-politik>, Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 21.35 WIB

The conversation.com (2024) *3 dampak negatif ketika pemerintahan dikuasai dinasti politik* <https://theconversation.com/demokrasi-di-rezim-prabowo-gibran-3-dampak-negatif-ketika-pemerintahan-dikuasai-dinasti-politik-222626>, Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 20.11 WIB

Azisrezarr (2023) *Politik Dinasti di Indonesia: Antara Tradisi, Etika, dan Dampak Negatifnya terhadap Demokrasi* <https://medium.com/@azisrahadian/politik-dinasti-di-indonesia-antara-tradisi-etika-dan-dampak-negatifnya-terhadap-demokrasi-3f146fbb1052>, Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 20.21 WIB

kbbi.lektur.id *5 Arti Kata Pengejawantahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* <https://kbbi.lektur.id/pengejawantahan>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie (2020) *Pancasila Adalah Identitas Konstitusional Bangsa Indonesia* <https://www.mpr.go.id/berita/Jimly-Asshiddiqie:-Pancasila-Adalah-Identitas-Konstitusional-Bangsa-Indonesia>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 09.50 Wib.

Kumparan.com (2023) *Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln dan Beberapa Ahli Lainnya* <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln-dan-beberapa-ahli-lainnya-20YtDqdEXgs>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 10.45 WIB.

Daewoong (2024) *Demokrasi menurut abraham lincoln* <https://daewoong.co.id/demokrasi-menurut-abraham-lincoln>, Diakses pada 16 Maret 2024 pukul 11.00 WIB.

Monica Ayu Caesar Isabela (2022) *Pancasila sebagai Sumber Etika Politik* <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/04000051/pancasila-sebagai-sumber-etika-politik>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 09.00 wib.

Seminar Kebijakan FISIP UI (2024) *Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca 2024* <https://fisip.ui.ac.id/masa-depan-demokrasi-indonesia-pasca-2024-seminar-kebijakan-fisip-ui/> diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.15 wib.

Transparansi Internasional (2024) *Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023*
<https://www.transparency.org/en/press/2023-corruption-perceptions-index-reveals-urgent-need-for-tangible-change-in-asia-pacific>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.23 wib.

DataboSkor Indeks (2024) *Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-oks-peringkatnya-turun>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.25 wib.

Khairunas (2015) *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)*
<https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.15 wib.

Aksi informasi (2023) *Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya*
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.45 wib.

Data Boks (2024) *Profesi Pelaku Korupsi 2023, Mayoritas Pejabat Eselon*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/07/profesi-pelaku-korupsi-2023-mayoritas-pejabat-eselon>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.45 wib.

Databoks (2023) *Cek Data: Anies Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Menurun, Benarkah?* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/12/cek-data-anies-sebut-indeks-demokrasi-indonesia-menurun-benarkah>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.33 wib.

Irfan Murpratomo (2023) *Kegagalan Reformasi Era Jokowi, Peretasan Medsos dan Pengintaian Rumah Oposisi* <https://www.kedaipena.com/kegagalan-reformasi-era-jokowi-peretasan-medsos-dan-pengintaian-rumah-opo>, Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.40 WIB.

Mohammad Maiwan (2018) *Memahami Teori-Teori Etika* <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9093>, Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.40 WIB.

- Zakky (2019) *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Penjelasannya* <https://www.zonareferensi.com/pengertian-demokrasi/>, Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 19.55 WIB.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir*. <https://onesearch.id/Record/IOS2847>, Diakses pada 1 Februari 2024 pukul 20.15 WIB.
- Kumpanan (2023) *Definisi dan Macam-Macam Nilai Menurut Notonegoro* <https://kumpanan.com/berita-terkini/definisi-dan-macam-macam-nilai-menurut-notonegoro-1zyjSuJyFFW>, Diakses pada 19 Maret 2024 pukul 19.55 WIB.
- Asnul (2021) *Mencermati Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Di Era Digital* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13951/Mencermati-Tantangan-Pancasila-Sebagai-Ideologi-Negara-Di-Era-Digital.html>, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 20.25 wib.
- Deksino, George Royke (2018) *Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia* <http://repository.uki.ac.id/852/1/George.pdf>, diakses pada tanggal 5 April 2024 pukul 21.25 wib.
- Databoks (2024) *KPK Tangani 161 Kasus Korupsi pada 2023, Gratifikasi Terbanyak* <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.00 wib.
- Databoks (2023) *ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat* <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.15 wib.
- Kompas.com (2023) *Skor Indeks HAM Indonesia 2023* <https://lestari.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.45 wib.
- Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M.(2023) *berita Tantangan Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Harus Dijawab dengan Langkah Nyata* <https://www.mpr.go.id>, diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.55 wib.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) *Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19 - 23 Tahun pada 2023* <https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 24 April 2024 pukul 20.05 wib.

Arum Sutrisni Putri (2022) Kompas.com *Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-sekarang)* <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 20.05 wib.

Ivan Doherty (2001), *NDI Worldwide Published Journal of Democracy "Democracy Out of Balance: Civil Society Can't Replace Political Parties" in the democracy_balance_indo* PDF (www.ndi.org), diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.05 wib.

Willy Yashilva(2024) goodstats.id ,*Jumlah Kerugian Negara dalam Satu Dekade Terakhir Akibat Koruptor* <https://goodstats.id/article> diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.05 wib.

Nada Naurah (2024) goodstats.id *Ada 161 Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada 2023, Pelaku Didominasi PNS*, <https://goodstats.id/article>, diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.25 wib.

Transparency International (2024) *Corruption Perceptions Index 2023* <https://r.search.yahoo.com> diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.30 wib.

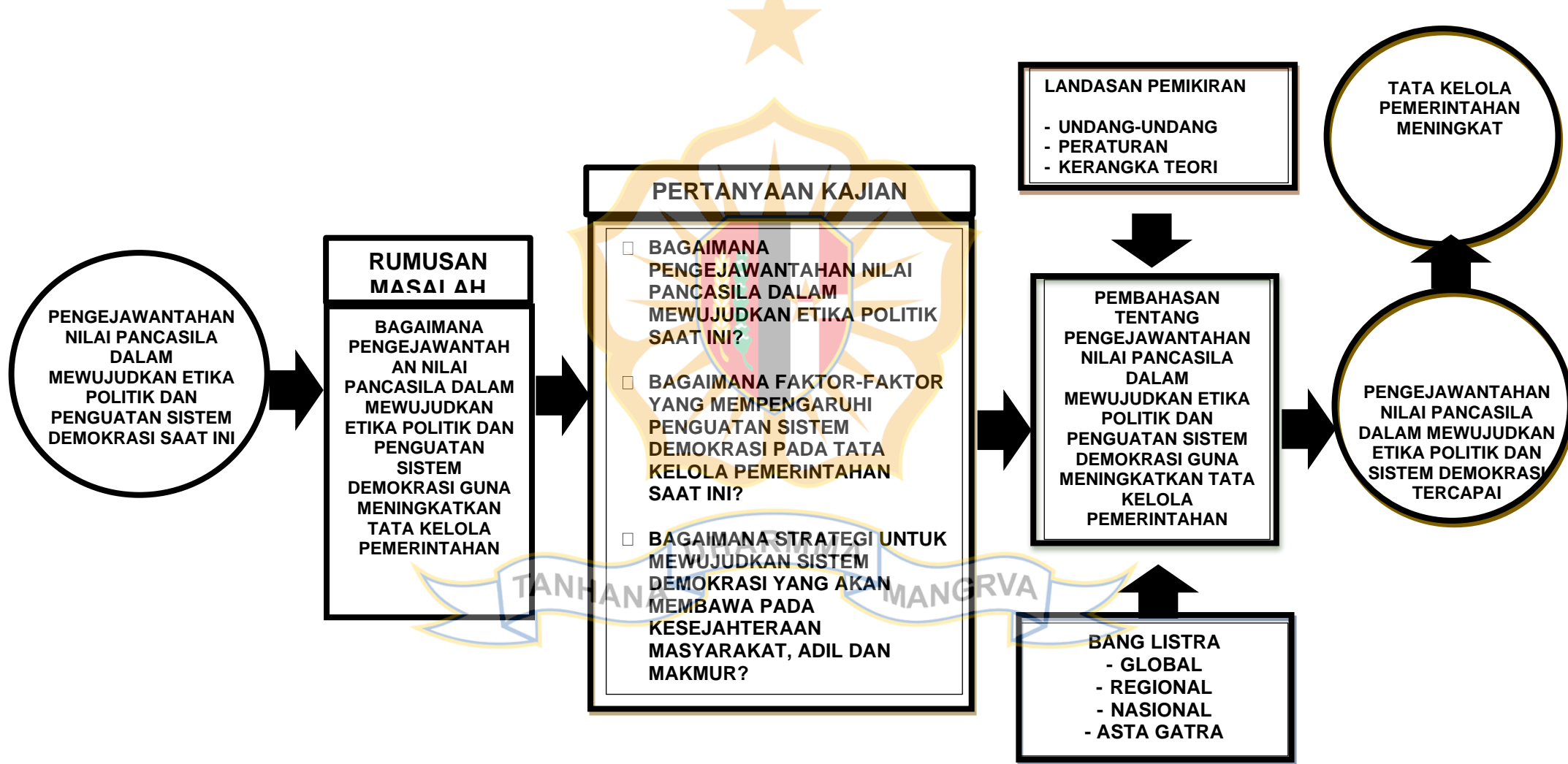
Penulis,



Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
Nomor Peserta 060

ALUR PIKIR

PENGEJAWANTAHAN NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN ETIKA POLITIK DAN PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI GUNA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



RIWAYAT HIDUP

DATA POKOK

1. NAMA : Mohamad Satriyo Utomo, S.H.
2. PANGKAT : Marsekal Pertama TNI
3. KORPS / PROF / SPES : Pnb / Penerbang / Tempur
4. NRP / NBI : 520281
5. TANGGAL LAHIR : 10-12-1973
6. TEMPAT LAHIR : Tarakan
7. AGAMA : Islam



PENDIDIKAN UMUM

1. SDN Kendangsari 1 No.276 Surabaya 1986
2. SMPN 13 Surabaya 1989
3. SMAN 1 Surabaya 1992
4. S-1 Universitas Merdeka Ponorogo 1999

DIKMA / DIKBANGUM

1. AAU 1995
2. Sekkau 2004
3. Seskoau 2009
4. Sesko TNI 2018

PENDIDIKAN MILITER (KURSUS)

1. Penataran P4 1995
2. Dik Aklan 1996
3. Sekbang 1997
4. AVIATION MEDICINE COURSE (SINGAPURA) 2003
5. FLIGHT SAFETY OFFICER COURSE (AUSTRALIA) 2003
6. SIP TNI 2005
7. Ground Forward Air Controller Course (SINGAPURA) 2007
8. Maritime Operation Law Course (Australia) 2012
9. Indonesia Military Airworthiness Authority (IMAA) 2012

RIWAYAT PANGKAT

- 27-07-1995 Letnan Dua
01-10-1998 Letnan Satu
01-10-2001 Kapten
01-04-2007 Mayor
01-10-2011 Letnan Kolonel
01-10-2015 Kolonel
15-03-2021 Marsekal Pertama TNI

RAHASIA



RIWAYAT JABATAN

27-07-1995 Pa Dp Gub AAU
 09-02-1996 Pama Dp Dan Lanud Adi
 25-06-1997 Pa Pnb Skadud 3 Lanud Iwj
 15-06-1998 Kasubsi Recording Siops Disops Skadud 3 Lanud Iwj
 10-09-2001 Pa Pnb Skadud 3 Wing 3 Lanud Iwj
 01-02-2002 Kaurjiteori Standeval Wing 3 Lanud Iwj
 26-05-2005 Pa Instruktur Wingdikterbang Lanud Adi
 08-02-2006 Instruktur Pnb Wingdik Terbang Lanud Adi
 09-03-2007 Dan Flightops A Skadud 15 Wing 3 Lanud Iwj
 19-03-2008 Kadisops Skadud 15 Lanud Iwj
 22-03-2011 Danskadud 15 Wing 3 Lanud Iwj
 12-10-2012 Pabandyaops Sops Kosek Hanudnas II Mks
 03-01-2013 Kastandeval Wing 3 Lanud Iwj
 02-09-2013 Danlanud Bny
 27-03-2015 Kasubdislan Disbangopsau
 05-08-2015 Asops Kosek Hanudnas I Jkt
 16-12-2016 Kasubdisbinprof PNB/NAV Disopslatau ((Organisasi Baru))
 28-03-2018 Pamen Sopsau ((Dik Sesko TNI))
 07-12-2018 Danwing 3 Lanud Iwj
 08-06-2020 Danlanud Sim
 28-12-2020 Paban II/Ops Sopsau
 23-02-2021 Danlanud Sri (Validasi Organisasi)
 16-01-2023 Kadisopslatau

RIWAYAT PENUGASAN

1. Operasi Pemulihan Keamanan Terpadu (aceh)	2003
2. Subject Matter Expert Exchange (Hawaii USA)	2010
3. Evaluasi Pesawat T-50 (korsel)	2011
4. Evaluasi Pesawat Pilatus (Swiss)	2012

TANDA KEHORMATAN

1. Bintang Yudha Dharma Nararya
2. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya
3. Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun
4. Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun
5. Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun
6. Satyalancana Dharma Nusa
7. Satyalancana Dharma Nusa Ulang I
8. Satyalancana Wira Nusa
9. Satyalancana Wira Siaga
10. Satyalancana Dwidya Sistha



